

**PENERAPANE-GOVERNMENT DI DESA SUNGAI BARU
KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**OLEH
EKI EFRIYANSYAH
NPM : 207321008**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Ujian Komprehensif
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : EKI EFRIYANSYAH
NPM : 207321008
Kekhususan :
Judul tesis : **PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI DESA SUNGAI
BARU KECAMATAN GAUNG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : **Senin**
Tanggal : **14 Maret 2022**
Pukul : **09.00 - 10.00**

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI PROPOSAL TESIS**

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M. Hum.
Anggota I

Dr. Sri Maulidiah, S.sos., M. Si.
Anggota II

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M. Hum.

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul
**PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI DESA SUNGAI BARU
KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh :

Nama : EKI EFRIYANSYAH
NPM : 207321008
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal.....13.01-22.....

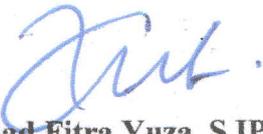

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Pembimbing II

Tanggal.....12 - 01 - 2022.....


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- ingat** :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- ingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- etapkan** :
1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : EKI EFRIYANSYAH
 N P M : 207321008
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Judul Tesis : "PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA SUNGAI BARU KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 10 JULI 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

NIP. 195408081987011002

Disampaikan Kepada :

h. Rektor Universitas Islam Riau

h. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKI EFRIYANSYAH**
NPM : 207371008
Program studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Penerapan *e-Government* di Desa Sungai Baru
Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di universitas islam riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan oleh orang lain. Kecuali berupa kutipan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas poin 1-3, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian Tesis dan/atau pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 2022
Yang Membuat Pernyataan,



EKI EFRIYANSYAH



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 025/A-UIR/5-PPS/2022

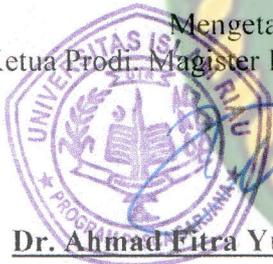
Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **EKI EFRIYANSYAH**
NPM : **207321008**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 21 Februari 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 21-Feb-2022 10:57 WIB
ID: 1767176145
Word Count: 22907
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
28%	Internet Sources: 28%
	Publications: 8%
	Student Papers: 17%

PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA SUNGAI BARU KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR By Eki Efriyansyah

- 3% match (Internet from 31-Mar-2021)
<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3519/1/ARTIKEL%20RENY.pdf>
- 2% match (Internet from 06-Jun-2021)
[http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2020/01/pin_bella%20\(01-08-20-01-34-07\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2020/01/pin_bella%20(01-08-20-01-34-07).pdf)
- 2% match ()
Q, Mariah Rabiatul, Raharso, M. "Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)", "Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS", 2020
- 2% match (Internet from 24-Oct-2018)
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7463/Bab%202.pdf?sequence=10>
- 2% match ()
Watrianthos, Ronal, Nasution, Ade Parjungan, Syaifulah, Muhammad. "MODEL e-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA", "Universitas Komputer Indonesia", 2019
- 1% match (Internet from 09-Mar-2020)
[http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2020/01/pin_bella%20\(01-08-20-01-34-07\).doc](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2020/01/pin_bella%20(01-08-20-01-34-07).doc)
- 1% match (Internet from 04-Feb-2022)
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18901-Full_Text.pdf
- 1% match (Internet from 10-Jan-2022)
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14048-Full_Text.pdf
- 1% match (Internet from 31-Jan-2016)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/131301/skripsi.pdf?sequence=1>
- 1% match (Internet from 16-Jun-2015)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8366/SKRIPSI%20AINUN%20AZWARIA.pdf?sequence=1>
- 1% match (Internet from 31-May-2021)
<http://repo.apmd.ac.id/927/1/FEBRIAN%20NUR%20RAMADHAN.pdf>
- 1% match (Internet from 02-Jan-2019)
[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20AYU%20fix%20\(10-15-15-02-37-23\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20AYU%20fix%20(10-15-15-02-37-23).pdf)
- 1% match (Internet from 08-Jan-2020)
<http://repository.umrah.ac.id/1903/1/Evaluasi%20Pelaksanaan%20Sistem%20Informasi%20Manajemen%20Daerah%20Barang%20Milit>
- 1% match (Internet from 08-Jan-2021)
https://mujihani.files.wordpress.com/2018/04/perbup_no_062_tahun_2016.pdf
- 1% match (Internet from 22-Jul-2020)
<http://eprints.undip.ac.id/61482/2/2. BAB 1 .PDF>
- 1% match (Internet from 05-Oct-2020)
<https://jeyecorner.blogspot.com/2011/05/analisis-website-pemerintah-kabupaten.html>
- 1% match ()
AlitAyuMeinarsari. "Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi : st", 2010
- 1% match (Internet from 08-Jan-2022)
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/13197/8328>
- 1% match (Internet from 26-Nov-2020)
https://www.researchgate.net/publication/338288622_Kesiapan_Desa_dalam_Penerapan_E-Government_Studi_Perbandingan_di_Desa_Semaya_dan_Desa_Pegirang_Kabupaten_Pemalang
- 1% match (Internet from 16-Jul-2017)
http://iztie22.blogspot.com/2012/10/01_archive.html
- 1% match (Internet from 28-May-2021)
<https://lendcreative.com/inilah-7-manfaat-website-untuk-desa-yang-penting-di-ketahui/>
- 1% match (Internet from 05-Aug-2021)
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/15279/PERBUP%20NOMOR%208%20TAHUN%202017.pdf>
- 1% match (Internet from 21-Aug-2021)
<https://kalsei.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/09/18-Perda-SOTK-PEMDES.pdf>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk orang tercinta dan tersayang dan kasihnya yang berlimpah

Teristimewa untuk ayahnda dan ibunda tercinta

Terimakasih atas segala dukungan dan doa untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya hingga sampai selesai menyelesaikan perkuliahan program pascasarjana. Dan juga tidak lupa kepada Nova Laura Yunice yang selalu mendukung memberi semangat dan mendoakan. Serta teman-teman terdekat terkhususnya yang ada di pekanbaru kepada Ahmad Roni, Pahmi dan wili yang selalu memberikan tempat tinggal selama di pekanbaru sehingga dapat menyelesaikan proses bimbingan tesis.



LEMBAR TUNJUK AJAR

Pemenang tidak akan pernah menyerah,
orang menyerah tidak akan pernah menang

Winner never quid, quitter never win



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Eki Efriyansyah lahir di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 22 Januari 1995, dari pasangan seorang ayah **Firman** dan Ibu **Nilatas Tuini**. Penulis menempuh pendidikan formal dari SD 038 Negeri Sungai Baru (lulus pada tahun 2006), melanjutkan ke MTs Al-Muhajirin (lulus pada tahun 2010), melanjutkan ke MA Hidayatul Islamiah Kuala Lahang (lulus pada tahun 2013) kemudian melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang provinsi KEPRI (Lulus pada tahun 2017). Setelah terselesainya pendidikan, pada tahun 2017 sampai saat ini penulis bekerja di Kantor Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Jabatan Struktural penulis di Kantor Desa sebagai Kasi Pemerintahan. Tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Riau di Pekanbaru, penulis mengambil Prodi Magister Ilmu Pemerintahan (lulus pada tahun 2022)

**IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN SUNGAI NEW VILLAGE,
GAUNG DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY**

ABSTRACT

EKI EFRIYANSYAH

E-government is the use of information and communication technology to support government activities. The implementation of e-government in Sungai Baru Village uses the G2G and G2C types. The G2G (government to government) type is the need to interact between one government and another in order to facilitate cooperation and work processes related to Village Finance and Assets. G2C (Government to citizen) is the most common e-government application where the government builds and implements various portfolios of information technology with the main aim of improving interaction relations with the community through access channels. This study aims to look at the implementation and inhibiting factors in the implementation of e-government in Sungai Baru Village. This type of research uses qualitative research with descriptive analysis method. The data collected using interviews, while the type of interview used by the researcher is a semi-structured interview, which is to determine more open problems. The informants in this study were based on the object under study and based on the relationship between the informants and researchers in the implementation of e-Government in the village. The results of this study indicate that there has been an application of e-government in the Sungai Baru village, this is marked by the existence of innovations, namely the Siskeudes application, Sipades application and the village website. In general, the implementation of e-government in the village has been optimal. This is seen from the elements of successful e-government implementation which include support, capacity, and value. First, regarding the support of the village government in implementing e-government, it is already good where the village government is willing to innovate and has implemented e-government in the village. Second, regarding the capacity, there is a telecommunications infrastructure for human resources and the availability of a budget that is already good but not optimal. Third, regarding the value that the implementation of e-government in this village has been utilized and felt by the village government. the implementation of e-government in Sungai Baru Village is also still hampered by several factors such as human resources and infrastructure and the lack of control and guidance functions from the stackholder so that the Sungai Baru Village Government needs to improve human resources and infrastructure and provide training to e-government implementers in the village. to support the success of e-government development in the Sungai Baru Village Government.

Keywords: *E-government, application Analysis, Inhibiting Factors*

PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI DESA SUNGAI BARU KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

EKI EFRIYANSYAH

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru menggunakan tipe G2G dan G2C. adapun tipe G2G (*government to government*) merupakan kebutuhan berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya demi memperlancar kerjasama dan proses kerja yang berkaitan dengan Keuangan dan Aset Desa. G2C (*Government to citizen*) merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat melalui kanal akses. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan dan faktor-faktor penghambat dalam penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan menggunakan wawancara, adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara semi terstruktur (*Semistructure Interview*) yaitu untuk menentukan permasalahan yang lebih terbuka. Informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan peneliti dalam pelaksanaan *e-Government* di Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru hal ini di tandai dengan adanya inovasi yaitu Aplikasi Siskeudes, Aplikasi Sipades dan *Website* Desa . Secara umum pelaksanaan *e-government* di Desa sudah optimal. Hal ini dilihat berdasarkan elemen sukses penerapan *e-governmant* yang meliputi *Support*/dukungan, *Capacity*/kemampuan, dan *value*/nilai. *Pertama*, mengenai *Support*/dukungan Pemerintahan Desa dalam penerapan *e-government* ini sudah baik dimana sudah ada kemauan Pemerintah Desa dalam melakukan inovasi dan sudah menerapkan *e-government* di Desa. *Kedua*, mengenai *Capacity*/kemampuan terdapat infrastruktur telekomunikasi sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang sudah baik tapi belum optimal. *Ketiga*, mengenai *value*/nilai bahwa dengan adanya penerapan *e-government* di Desa ini sudah dimanfaatkan dan dirasakan oleh pemerintah desa. penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru juga masih dihambat oleh beberapa faktor seperti sumberdaya manusia dan infrastruktur dan Kurangnya fungsi kontrol dan pembinaan dari *stackholder* sehingga Pemerintah Desa Sungai Baru perlu meningkatkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana infrastruktur serta meberi pelatihan kepada pelaksana *e-government* di Desa untuk menunjang keberhasilan pengembangan *e-government* di Pemerintahan Desa Sungai Baru.

Kata Kunci : *E- government, Analisis Penerapan, Faktor-faktor Penghambat*

KATA PENGANTAR

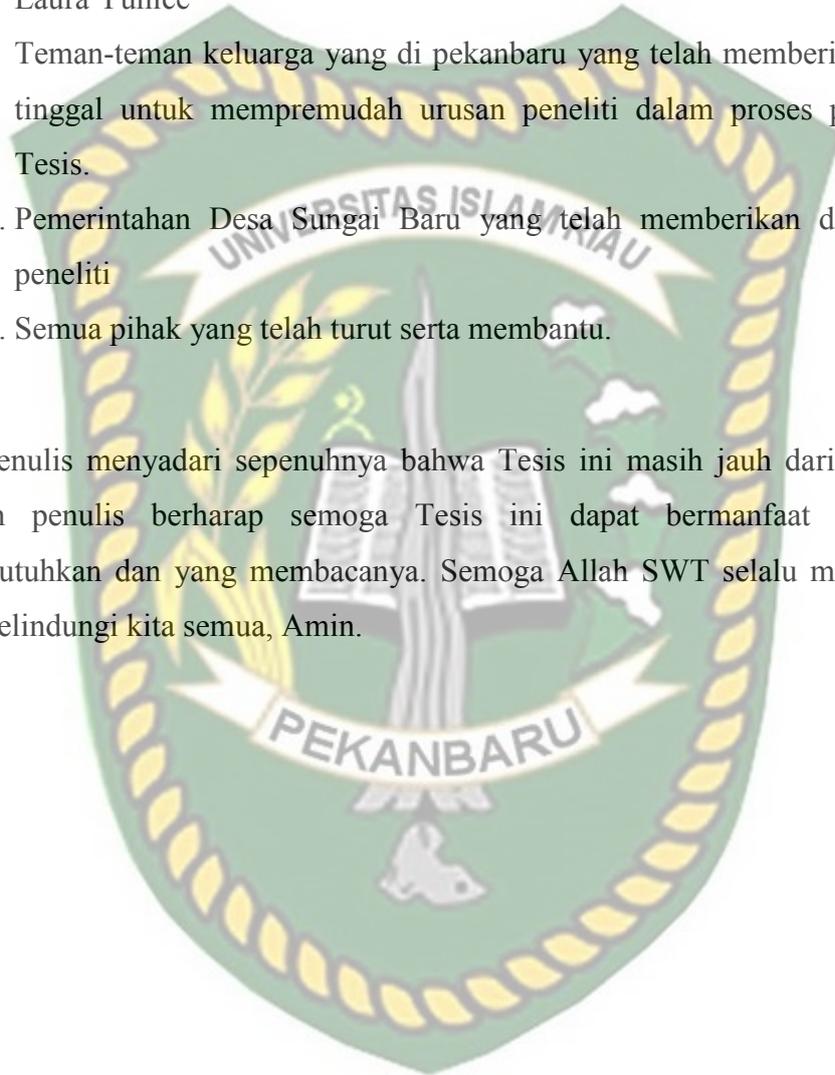
Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesempatan serta kemudahan bagi penulis sehingga penulis dapat Menyelesaikan Proposal Penelitian Tesis dengan judul **“PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA SUNGAI BARU KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”** Penelitian Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Di dalam proses penulisan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi, SH., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak prof. Dr. H Yusri Munaf, SH., M. Hum Selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan ilmu, dukungan, dan kesabaran selama membimbing penulis dari awal hingga penulisan usulan penelitian ini selesai;
3. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
6. Pemerintahan Desa Sungai Baru yang telah berkenan memberikan ijin dan pengumpulan data;

7. Kepada orang Tuaku yang tercinta Firman (*Abah*) dan Nilatas Tuini (*ibu*) yang telah memberikan dukungan dan berkorban demi impianku.
8. Yang senantiasa memberikan Semangat, harapan, doa dan dukungan Nova Laura Yunice
9. Teman-teman keluarga yang di pekanbaru yang telah memberikan tempat tinggal untuk mempermudah urusan peneliti dalam proses penyelesaian Tesis.
10. Pemerintahan Desa Sungai Baru yang telah memberikan data kepada peneliti
11. Semua pihak yang telah turut serta membantu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Amin.



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan Tim Penguji	ii
Surat Pernyataan	iii
Halaman Persembahan	iv
Lembar Tunjuk Ajar	v
Riwayat Hidup Penulis	vi
Abstrack	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Datar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Batasan Masalah	8
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan	9
2. Kegunaan	9
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
2.1. KONSEP TEORI	11
2.1.1 Pemerintahan	11
2.1.2 Ilmu Pemerintahan	12
2.1.3 Teknologi Informasi	13
2.1.4 Sistem Informasi Manajemen	14
2.1.5 Electronic Government (<i>E-Government</i>)	15
2.1.6 Konsep <i>e-Government</i>	18
2.1.7. Aplikasi <i>e-Government</i>	20
2.1.8 Menuju <i>e-Government</i>	22
2.1.9 Manfaat <i>e-government</i>	23
2.1.10 Kerangka Arsitektur <i>E-Government</i>	24
2.1.11 Jenis Pelayanan <i>E-government</i>	25
2.1.12 Pengembangan <i>E-Government</i>	27
2.1.13 Elemen Sukses <i>e-government</i>	28

2.2	ULASAN KARYA	30
2.3	KERANGKA PEMIKIRAN	32
2.4	KONSEP OPERASIONAL	35
2.5	OPERASIONAL VARIABEL	39
BAB III : METODE PENELITIAN		40
3.1	Tipe Penelitian	40
3.2	Lokasi Penelitian	40
3.3	Informan	41
3.4	Jenis dan Sumber Data	42
1.	Data Primer	42
2.	Data Sekunder	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data	43
1.	Wawancara	44
2.	Observasi	44
3.	Dokumentasi	45
4.	Studi Literatur	45
3.6	Teknik Analisis Data	45
1.	Reduksi data (<i>Data Reduction</i>)	46
2.	Penyajian data (<i>Data Display</i>)	46
3.	Penarikan kesimpulan/verifikasi (<i>Conclusion Drawing/verification</i>)	47
3.7	Rancangan sistematika penulisan	47
3.8	Jadwal Penelitian	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN		49
4.1	Identitas Informan	49
4.2	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.2.1	Profil Desa	50
4.2.2	Sejarah Desa	50
4.2.3	Letak Geografis	52
4.2.4	Demografi	52
4.3	Penerapan <i>e-Government</i> Di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir	66
4.3.1	Dukungan/ <i>Support</i>	67
1.	Keinginan Pemimpin dalam menerapkan <i>e-Government</i>	67
2.	Payung Hukum yang mengatur dengan jelas tentang penerapan <i>e-government</i>	70

3. Pemerintah desa mampu memberikan berbagai bentuk inovasi e-government.....	74
4.3.2 Kemampuan/ <i>Capacity</i>	95
1. Infrastruktur Telekomunikasi.....	95
2. Sumber Daya Manusia.....	99
3. Sumber Daya Finansial (Ketersediaan Anggaran).....	103
4.3.3 Nilai/ <i>Value</i>	106
1. Manfaat Penerapan Aplikasi Siskeudes.....	106
2. Manfaat Penerapan Aplikasi Sipades.....	108
3. Manfaat Penerapan <i>Website</i> Desa.....	111
4.4 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan <i>e-Government</i> di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir ...	114
4.4.1 Dukungan/ <i>Support</i>	115
1. Keinginan Pemimpin dalam menerapkan <i>e-Government</i>	115
2. Payung Hukum yang mengatur dengan jelas tentang penerapan <i>e-government</i>	116
3. Pemerintahan Desa Mampu memberikan berbagai bentuk inovasi <i>e-Government</i>	116
4.4.2 Kemampuan/ <i>Capacity</i>	117
1. Infrastruktur Telekomunikasi.....	117
2. Sumber Daya Manusia.....	118
3. Sumber Daya Finansial (Ketersediaan Anggaran).....	119
4.4.3 Nilai/ <i>Value</i>	120
1. Manfaat Penerapan Aplikasi Siskeudes.....	120
2. Manfaat Penerapan Aplikasi Sipades.....	120
3. Manfaat Penerapan <i>Website</i> Desa.....	121
 BAB V : PENUTUP.....	 123
5.1 Kesimpulan.....	123
5.2 Saran.....	129
 DAFTAR PUSTAKA.....	 130
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Transformasi Menuju <i>E-Government</i>	22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 2.3 Penerapan <i>e-government</i> di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir	37
Tabel 3.1 Informan Penelitian	41
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Identitas Informan	49
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk.....	53
Tabel 4.3 Regulasi Pendukung Penerapan <i>E-Government</i> Provinsi Riau.....	70
Tabel 4.4 Regulasi Pendukung Penerapan <i>E-Government</i> di Desa	71
Tabel 4.5 Bentuk Inovasi <i>e-Government</i> Desa.....	75
Tabel 4.6 Modul Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SISKEUDes).....	76
Tabel 4.7 Modul Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADes).....	87
Tabel 4.8 Modul Website Desa.....	90
Tabel 4.9 Infrastruktur Telekomunikasi Pemerintahan Desa Sungai Baru .	96
Tabel 4.10 Kopetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sungai Baru.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Pengembangan <i>e-government</i>	19
Gambar 2.2 kerangka arsitektur <i>e-governmnet</i>	24
Gambar 2.3 Kerangka Penelitian	32
Gambar 4.1 Peta Desa	50
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Baru.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Aplikasi Siskeudes	134
1.1 Halaman Login aplikasi siskeudes.....	134
1.2 Halaman Utama aplikasi siskeudes.....	134
1.3 Parameter Data Entri.....	135
1.4 Parameter Perencanaan.....	135
1.5 Parameter Penganggaran.....	135
1.5 Parameter Penatausahaan.....	136
1.7 Parameter Pembukuan.....	137
Lampiran II Aplikasi Sipades	139
2.1 Tampilan Awal Aplikasi SIPADES.....	139
2.2 Parameter inventaris barang.....	139
Lampiran III Website Desa.....	141
3.1 Tampilan Awal Website Desa.....	141
3.3 Tampilan Layanan Berita Desa.....	141
Lampiran IV Rekap Hasil Wawancara	142
Lampiran IV Rekap Hasil Observasi	154



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi pada saat ini sudah berkembang pesat terutama diberbagai sektor. Peran Teknologi Informasi berdampak kepada lebih baiknya dukungan kepada akses dan pengolahan informasi terhadap layanan publik di daerah maupun pusat. Pemerintah memiliki peran dalam menghasilkan kebijakan dan tindakan pada setiap sektor dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam mendukung kinerja layanan publik *e -Government*.

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi menjadi sumber daya utama bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan secara optimal serta meningkatkan daya saing dalam era globaliasi. Perkembangan teknologi mendorong agar pemerintah tidak hanya menyelenggarakan layanan publik secara konvensional sebab telah hadir model pelayanan publik yang dilakukan melalui *e-government*. Penerapan *e-government* memberikan banyak manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis.¹

Perananan pemerintah dalam memberikan sebuah layanan terhadap masyarakat menjadi prioritas, hal ini menjadikan berbagai fasilitas layanan yang digunakan oleh pemerintah selalu mengedepankan kepuasan pelayanan, efektifitas pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaannya. Hal inilah yang menjadikan pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada

¹ Kodarisman, R., & Nugroho, E. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, 2(2), 24-32.

masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan, salah satunya adalah dengan membuat suatu sistem berbasis teknologi informasi secara terintegrasi antar lembaga pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah adalah membangun sebuah konsep *e-Government* pada setiap tingkatan instansi pemerintah.

Digital age has delivering impact into many sectors whether private of government sector, which is oriented on building organization effectively, easy way of connectivity and customer/public service statisfaction were create a lot of system changing rapidly.²

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa keuntungan dari era digital telah memberikan dampak ke banyak sektor baik sektor pemerintahan dan swasta, yang berorientasi pada pembangunan organisasi secara efektif, kemudahan konektivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan kepuasan pelanggan/pelayanan publik yang membuat banyak sistem berubah dengan cepat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi untuk memberikan layanan publik, Penerapan *e-government* bertujuan untuk menyelaraskan semua instansi atau badan yang sudah ada supaya terintegrasi sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan efektif dan efisien.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju *good government*. penerapan *e-government* dapat memperbaiki manajemen internal dan peningkatan pelayanan publik. Dengan *e-government* dapat mempermudah,

² Al-Adawi, Z., Yousafzai, S., & Pallister, J. (2005, September). Conceptual model of citizen adoption of e-government. In *The second international conference on innovations in information technology* (pp. 1-10). Citeseer.

mempermurah, mempercepat, memperingan dan memperindah kehidupan serta mempercepat akselerasi pembangunan ICT antara daerah, regional, nasional.

Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* disebutkan tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan diimplementasikannya *E-Government* di Indonesia, diantaranya, pertama Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kedua, Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan *E-Government* akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government*.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam memanfaatkan Teknologi Informasi ini menjadikan *e-Government* Desa bisa sebagai wahana pertanggungjawaban pemerintah Desa atas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga akan tercipta pemerintahan yang mandiri, transparan dan akuntabel. *E-Government* dalam pemerintahan Desa tidak hanya masalah *website* sebuah Desa, tapi merupakan sistem terintegrasi oleh teknologi informasi sehingga menjadikan pemerintahan Desa menjadi lebih efisien dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa.

Dukungan Teknologi Informasi dalam pemerintahan Desa akan mendorong data tunggal yang selalu *updateable* melalui aparatur desa. Atas dasar pemikiran inilah penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian terhadap pengembangan model *e-Government* bagi pemerintahan lokal setingkat desa khususnya Desa Sungai Baru sebagai pondasi dasar pelayanan publik ke tingkat pemerintahan di atasnya. Praktek *e-government* di Kabupaten Indragiri Hilir relatif berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan berinovasinya Desa-Desa dalam melakukan tranformasi menuju *e-government*.

Penerapan *E-Government* di Desa Sungai Baru menggunakan tipe *Government to Government* dan *Government to citizen*. Pertama, *Government to Government* yang memiliki kebutuhan berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainya demi memperlancar kerjasama dan proses kerja yang berkaitan dengan Keuangan, Aset dan layanan informasi. Kedua *Government to citizen* merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat melalui kanal akses seperti *Website* Desa. Pemerintahan Desa Sungai Baru sudah menggunakan teknologi komunikasi berbasis aplikasi *online* dan *offline* diantaranya adalah aplikasi SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa) aplikasi SIPADES (Sistem Infromasi Aset Desa) dan kanal akses *Website* Desa www.sungaibaru.desa.id.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP untuk membantu pemerintah Desa dalam melakukan

pelaporan keuangan desa. Untuk di desa aplikasi ini masih *offline* Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah tertata dengan baik.

Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yaitu aplikasi yang melakukan pencatatan administrasi aset tetap desa mulai dari merencanakan, mengadakan, penata usahaan hingga penyampaian laporan lengkap dengan kodefikasi dan labelisasi aset tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya yaitu untuk menertibkan kepemilikan aset dalam upaya meminimalkan resiko kehilangan aset desa dan memberikan kemudahan kepala desa dalam menyajikan laporan aset tetap yang dimiliki kantor desa, serta sebagai sistem informasi yang membantu perangkat desa dalam melakukan tata kelola aset tetap.

Website desa adalah sebuah website yang dibuat untuk menampilkan informasi tentang suatu desa secara online. Dengan adanya penerapan dan pengembangan aplikasi berbasis *e-government* seperti aplikasi *Software* yang sudah dimiliki baik *online/offline* di pemerintahan Desa Sungai Baru merupakan langkah awal upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronik dan juga dapat menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah, juga bisa mempermudah hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat secara efektif dan efisien.

Melalui pengembangan dan penerapan *E-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan instansi pemerintah khususnya Pemerintahan Desa Sungai Baru yang melaksanakan fungsi kemanfaatan dan kegunaan aplikasi ini. Dengan berjalannya aplikasi berbasis *E-Government* di Pemerintahan Desa maka diharapkan seluruh aktivitas organisasi pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah kerja pegawai dan waktu yang digunakan juga sangat cepat beserta fungsi kebijakan dan hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah, dalam pelaksanaannya konsep *E-Government* ini merupakan tanggung jawab bersama, artinya bukan hanya pemerintah saja tetapi juga peran serta masyarakat (*share goals*).³

Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru terdapat beberapa hambatan baik dari Aplikasi SISKEUDES, aplikasi SIPADES, dan Website Desa. **Pertama** aplikasi Siskeudes dalam pelaksanaannya terdapat kurangnya kapasitas Bendaharawan desa dalam menjalankan aplikasi tersebut. Untuk melakukan tugasnya di jalankan oleh sekretaris desa. Peningnya pemahaman aparatur pemerintahan Desa sungai baru dalam mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes sangat penting, karena aparat pemerintah desa sebagai pelaksana aplikasi tersebut, oleh karena itu aparat pemerintah desa dituntut melek teknologi informasi guna menyukseskan penerapan aplikasi siskeudes di Kabupaten Indragiri Hilir.

³ Mulyono. 2011. *Menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dengan E-Government*. Bandung: Agenda Obsevasi.

Kedua aplikasi SIPADES dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yaitu hambatan yang dialami perangkat Desa dalam penggunaan aplikasi SIPADES seperti sistem yang sering error, kurangnya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan SIPADES, serta tidak ada pendampingan berkelanjutan jika perangkat Desa menemui kesulitan dalam penggunaan aplikasi.

Ketiga Website Pemerintahan Desa Sungai Baru masih pada tahap persiapan hal ini ditandai dengan adanya situs *website* Desa, terdapat beberapa kendala dalam penerapan *website* desa yaitu infrastruktur teknologi yang tidak memadai di Desa serta tidak adanya sosialisasi situs informasi kepada masyarakat diketahui bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan *e-governmemnt* di Desa Sungai Baru hal ini di sebabkan karena kurangnya fungsi kontrol dan pembinaan dari *stackholder* terkait, kurangnya komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, masih minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelohan data. tidak adanya koneksi jaringan sehingga pelaksanaan *e-government* di Desa Sungai Baru belum bisa berjalan dengan baik. Dari permasalahan diatas kemudian menjadi topik yang menarik bagi peneliti ingin mengetahui bagaimana Penerapan *e-government* yang dilakukan Desa Sungai Baru dalam penerapan *e-Government*, yaitu dengan judul. **“PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA SUNGAI BARU KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Infrastruktur teknologi informasi (jaringan internet) di Desa tidak memadai.
2. Kurangnya fungsi kontrol dan pembinaan dari *stackholder*.
3. Lemahnya kapasitas SDM

1.3. Rumusan Masalah

E-Government merupakan langkah awal upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas Pelayanan informasi dan komunikasi Desa di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun Identifikasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir?

1.4. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkup atau objek penelitian ini terbatas pada bagaimana pemerintahan Desa memaksimalkan Penerapan *e-government*.
2. Faktor penghambat dalam penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penulisan Usulan Penelitian dengan judul “Penerapan *E-Government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir” ini bertujuan:

- a. Mengetahui Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan

Penulisan Usulan Penelitian dengan judul “Penerapan *E-Government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir” ini berguna untuk:

- a. Kegunaan secara teoritis, untuk mengembangkan wawasan ilmu pemerintahan dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Penerapan *E-Government* ditingkat Desa.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan bagi

pemerintahan Desa Sungai Baru dan Desa-desa lainnya agar bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintah berbasis *e-Government* yang efektif dan efisien.

- c. Secara Kontribusi Memberikan penjelasan terkait pentingnya memaksimalkan *e-government* di Desa guna mewujudkan kualitas layanan kepada masyarakat berbasis elektronik dan merekomendasikan solusi agar pemerintahan Desa Sungai Baru bisa memaksimalkan sistem informasi yang sudah dibuat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. KONSEP TEORI

2.1.1 Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
2. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Didalam kata dasar “pemerintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah di sebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah mewakili kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang syah (dalam bahasa arabnya dikenal dengan “*sami'na wa 'ata'na*”).
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara pertikal maupun horizontal.

Government is best defined as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority. (maksudnya pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya).

Menurut Munaf, Yusri (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga

pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.⁴

Pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun oleh lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebagai penjaga malam yang mementingkan ketertiban tetapi juga jangan lupa pada ketentraman dan kesejahteraan jadi jangan hanya mampu berkuasa tetapi juga mampu untuk melayani⁵.

2.1.2 Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁶ Mengenai penjelasan diatas mengenai ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan

⁴ Yusri, M. (2016). Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh Publishing

⁵ Hasyimsah, Ensiklopedia Pemerintahan & Kewarganegaraan : Sistem dan Bentuk Pemerintah Di Dunia Jilid 7. Jakarta : Lentera Abadi, 2010

⁶ Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT Rineka

koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.⁷

C.F. Strong (1960) mengatakan Ilmu pemerintahan merupakan organization yang mana diletakkan hak pelaksanaan kekuasaan tertinggi atau berdaulat. Strong memandang pemerintahan lah yang mempunyai kekuasaan. Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan- kegiatan kenegaraan dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga Pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal terhadap para warganya. Pemerintahan umum menurutnya adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dan berbagai instansi milik penguasa, yang didalam kehidupan modern sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting.⁸

2.1.3 Teknologi Informasi

Information Technology Association of America (ITAA), teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Teknologi Informasi (TI) memanfaatkan komputer elektronik

⁷ Syafii, I. K. 2011. Pengantar ilmu pemerintahan. Refika Aditama

⁸ Syafii, I. K., 2005. ilmu pemerintahan. PT bumi aksara

dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman⁹. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja, peralatan komunikasi dan jaringan, merupakan contoh teknologi informasi.¹⁰

2.1.4 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. sistem adalah “sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”.¹¹ Sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolah data oleh suatu organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud memberikan data yang bersifat intern maupun data yang bersifat ekstern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

⁹ Iqbal, Muchamad, Sutarman Sutarman, and Deri Irmansyah. "Perancangan Sistem Informasi Project Management Berbasis Web Pada PT Visionet Data Internasional." *Academic Journal of Computer Science Research* 1.1 (2019).

¹⁰ Abdul Kadir. 2007. Pengenalan Sistem Informasi. Andi. Yogyakarta

¹¹ Edhy Sutanta. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Graha Ilmu. Yogyakarta

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Sistem informasi manajemen juga suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi”.¹² “unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (input), pengolahan (processing), dan keluaran (output)”.¹³

Dari pengertian sistem informasi manajemen (SIM) diatas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

2.1.5 *Electronic Government (E-Government)*

E-government adalah istilah yang menurut beberapa kalangan, didefinisikan secara beragam. intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, dalam melihat e-government, jangan terpaku oleh unsur 'e' - nya semata, tetapi yang lebih penting lagi adalah proses dan jalannya pemerintahan melalui fasilitas internet atau media online. Sehingga terdapat dua hal utama

¹² Mcleod, Raymod.2010.Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

¹³ Kumorotomo,Wahyudi. dan Agus,Subando Margono. (2011). Sistem informasi manajemen dalam organisasi-organisasi publik : Gadjah Mada University Press

dalam pengertian e-government di atas, pertama adalah penggunaan teknologi komunikasi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan kedua adalah tujuan pemanfaatannya sehingga jalannya pemerintahan dapat lebih efisien. Melalui teknologi informasi/internet, seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih cepat sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. E-government bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Pada konsep e-government, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. E-government hanya berfungsi pada konteks penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.¹⁴

E-Government secara mudah dapat diartikan sebagai tata cara pemerintahan secara elektronik. Sedangkan dalam arti luas, *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparansi dan persamaan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. *Electronic Government* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *E-Government* sebenarnya

¹⁴ Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi

memiliki banyak defenisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun institusi tertentu.

World Bank Group (2001) menyatakan E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improve interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management.

Maksudnya ialah penggunaan teknologi informasi oleh aparat pemerintah mampu meningkatkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. TI memberikan banyak manfaat dibidang perbaikan pelayanan pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan industri, serta pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sebagaimana dikutip dari Jurnal *E-Government Diffusion: Evidence from the Last Decade* Juni 2013 :

“The advantages of e-government systems are unquestionable. These systems deliver government services to citizens in an effective and efficient manner: thus increasing transparency and accountability, lessening corruption, and grow revenue and/or reduce costs. These advantages are some of the main reasons behind the adoption of e-government by developed and developing countries. However, governments and citizens cannot benefit from e-government unless they embrace and adopt these services.”

Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa keuntungan dari sistem E-government merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sistem ini memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat secara efektif dan efisien dan mempermudah hubungan administrasi antara kantor-

kantor pemerintah setempat sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi korupsi, dan meningkatkan pendapatan dan atau mengurangi biaya. Keuntungan ini adalah beberapa alasan utama di balik penerapan *E-government* di negara-negara maju dan berkembang. Namun, pemerintah dan warga tidak bisa mendapatkan keuntungan dari *E-government* kecuali mereka merangkul dan mengadopsi layanan ini.

2.1.6 Konsep e-Government

Konsep dasarnya *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain. Setidaknya terdapat empat klasifikasi hubungan bentuk baru dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini.¹⁵

1. *Government to Citizen (G2C)*

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *E-Government* yang paling umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *E-Government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat

¹⁵ Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi

dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

2. *Government to Government (G2G)*

Yaitu pola yang melingkupi pertukaran data dan informasi secara vertikal atau horizontal antar lembaga pemerintahan. Dampaknya adalah kecepatan pengolahan data dan informasi yang lebih cepat (efektif) dan penghematan anggaran (efisiensi).

3. *Government to Business (G2B)*

Yaitu pola yang melingkupi bagaimana peran pemerintah dalam hubungannya dengan dunia bisnis. Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah pembentukan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. *Government to Employees (G2E)*

Pada akhirnya aplikasi *E-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini salah satunya: Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya.

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi *Electronic Government (E-Government)* yang di kembangkan oleh pemerintah. Keberadaanya tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah.

2.1.7. Aplikasi *e-Government*

Dalam membangun sistem aplikasi *e-Government* diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi *e-Government* menurut Cetak Biru (*blueprint*) Sistem Aplikasi *E-Government* Bagi Lembaga Pemerintah Daerah sebagai berikut :¹⁶

1. *Reliable*
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan *bug free*.
2. *Interoperable*
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem.

¹⁶ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2004. *Blueprint Sistem Aplikasi E-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*. Jakarta.

3. *Scalable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.

4. *User Friendly*

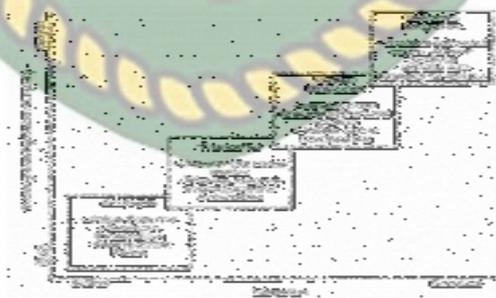
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya.

5. *Integrateable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

Dalam pengusulan model *e-Government* Desa ini, terdapat empat model tahapan pengembangan e-Government yang dapat digunakan. Model ini terbagi atas dimensi kompleksitas teknologi dan organisasi dengan tingkat integrasi data dan informasi. Adapun tahapan pengembangan tersebut adalah”:

Gambar 2.1 Model Pengembangan e-government



1. *Cataloging*

tahapan ini fokus kepada bagaimana pemerintah mampu memberikan berbagai bentuk informasi dan menpresentasikannya ke dalam website.

2. *Transaction*

tahapan yang memiliki karakteristik ada sistem internal pada pemerintah yang terhubung langsung melalui antar muka (GUI) dan memberikan kesempatan masyarakat untuk mengaksesnya.

3. *Vertical Integration*

tahapan yang memiliki karakteristik ada hubungan antara pemerintah lokal dan pusat dalam satu fungsionalitas pelayanan administrasi pemerintah.

4. *Horizontal Integration*

Tahapan yang memiliki karakteristik adanya integrasi pada lintas fungsi dan pelayanan.

2.1.8 Menuju *e-Government*

Tabel 2.1
Tranformasi Menuju *E-Government*

Government to e-Government	
Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis ICT
<p>Tranformasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Perubahan - Perubahan Budaya Kerja - Perubahan Proses Kerja - SOP Dan Kebijakan Politik - Peraturan Danperundangan - Leadhersip 	<p>Pemanfaatan ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Internet - Penggunaan Infrastruktur Telematika - Penggunaansistem Aplikasi - Standarisasi Metadata - Transaksi Elektronik - Elektronik Data Interchange - Electronic Documentation

Sumber: Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi E-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah, 2017

Melaksanakan e-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi IT. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal.

Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus menggunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik.

2.1.9 Manfaat *E-Government*

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu negara antara lain :

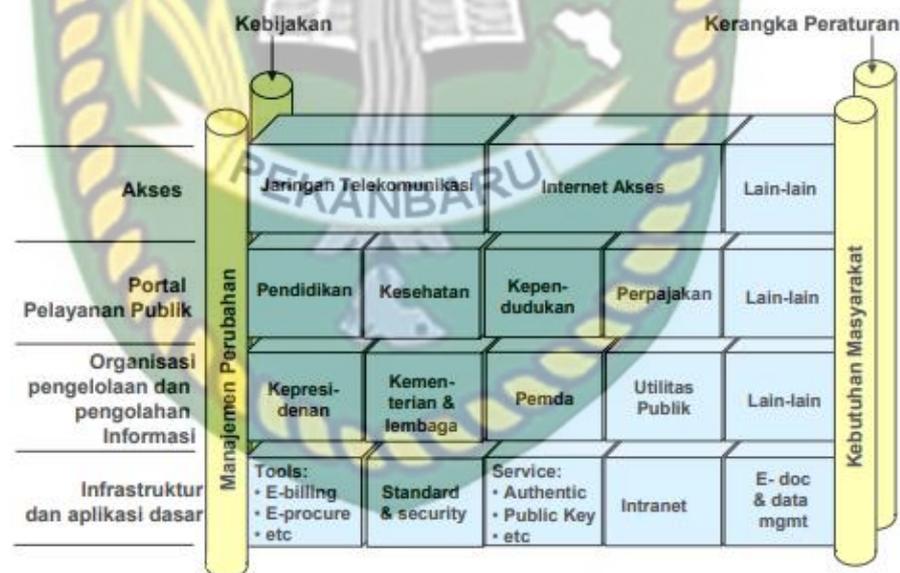
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.¹⁷

2.1.10 Kerangka Arsitektur *E-Government*

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur dibawah ini.

Gambar 2.2 Kerangka Arsitektur *E-Government*



Sumber: Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003

Kerangka arsitektur itu terdiri 4 (empat) lapis struktur, yakni:

- a. Akses yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.

¹⁷ Ndrajit 2006 Electronic Government, Konsep pelayanan publik Berbasis Internet dan teknologi Informasi, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK)PERBANAS, Jakarta

- b. Portal Pelayanan Publik yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu mengintegrasikan proses pengolahan dan pengolahan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.
- c. Organisasi pengelolaan & pengolahan informasi yaitu organisasi pendukung *back-office* yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
- d. Insfrakstur dan aplikasi dasar yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan transaksi, dan penyaluran informasi. baik antar *back-office*, antar portal pelayanan publik dengan *back-office*, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya.

Struktur tersebut di tunjang dari 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan.

2.1.11. Jenis Pelayanan *E-government*

Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Government. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama:

1. Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan;
2. Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya

Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-Government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: Publish, Interact, dan Transact.

a. **Publish**

Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas Publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website) departemen atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan.

b. **Intract**

Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif, pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask questions, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya).

c. **Transact**

yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.¹⁸

¹⁸ Indrajit, dkk. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital. Yogyakarta: Andi

2.1.12 Pengembangan *E-Government*

Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidak pastian, oleh karena itu pengembangan *E-Government* perlu dirancang dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut :

- a. Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi :
 - Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
 - Penyiapan SDM;
 - Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll;
 - Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- b. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi :
 - Pembuatan situs informasi publik interaktif;
 - Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
- c. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi :
 - Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
 - Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain
- d. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi :
 - Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.
 - Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat - 4.¹⁹

¹⁹ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Pengembangan e-Government

Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah pengaturan.

2.1.13 Elemen Sukses *e-government*

Elemen Sukses *e-Government* Suksesnya pengembangan *e-Government* bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses. Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh *Harvard JFK School of government* meliputi *Support* (Dukungan), *Capacity* (Kemampuan), dan *Value* (Nilai).²⁰ Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dukungan/*Support*

Kata *support* adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki *political will* (keinginan politis) untuk mengembangkan *e-Government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *e-Government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (*action*). Tanpa adanya unsur *political will*, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan

²⁰ Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi

pengembangan *e-Government* dapat berjalan dengan mulus. Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *top-down* (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi program *e-Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati).

2. Kemampuan/*Capacity*

Kemampuan/*Capacity* adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan *e-government*. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplementasikan dan membangun *e-government*, yaitu :

- a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*
- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3. Nilai/*Value*

Nilai/*Value* Elemen pertama dan kedua diatas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-*supply side*). Pelaksanaan *e-government* tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang

menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-*demand side*). Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) secara signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Perpaduan antara ketiga elemen diatas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan *e-government*) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan *e-government*.

2.2 ULASAN KARYA

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian dengan judul yang sama Dan tidak sama seperti judul penelitian penulis tapi penelitian terdahulu lebih kepada perbandingan. penulis mengangkat penelitian ini sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3
<p>Subhan, arif budy pratama Volume 7 Nomor 2 2019, Halaman 161-175</p>	<p>KESIAPAN DESA DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT (studi perbandingan di desa semaya dan desapengiringan kabupaten pemalang)</p>	<p>Aspek sistem data, landasan hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi serta kepemimpinan dan pemikiran strategis berperan dalam kesiapan penerapan e-government. Beberapa implikasi kebijakan dapat dirumuskan untuk meningkatkan kesiapan Pemerintah Desa dalam implementasi e-government.</p>
<p>Ronal Watrianthos, Ade Parlaungan Nasution, Muhammad Syaifullah Program Studi Manajemen Informatika AMIK Labuhan Batu Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.17 No. 1</p>	<p>MODEL e-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA</p>	<p>a. Diperlukan SDM yang terlatih terutama dari perangkat desa menggunakan Teknologi Informasi dalam perencanaan model e-Government Desa ini. b. Tahapan identifikasi ruang lingkup desa merupakan tahapan penting dalam mengukur kesiapan desa menggunakan model e-Government ini.</p>
<p>Muhammad Alif, Hardi Warsono Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro</p>	<p>ANALISIS PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM PENYEDIAAN AKSES INFORMASI DI PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government sudah baik, namun pada pengembangan e-government masih terdapat beberapa permasalahan dalam SDM dan fasilitas yang ada. Direkomendasikan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi dorongan dalam pengembangan e-government di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada para pemustaka.</p>

<p>Dien Novita Eksplora Informatika Vol. 4, No. 1, September 2014</p>	<p>FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT: (Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan)</p>	<p>Faktor yang paling berpengaruh terhadap hambatan dalam pengembangan e-government di tingkat pemerintah kota, yaitu kota Palembang ini adalah variabel lemahnya kepemimpinan, langkanya sumberdaya manusia, kurangnya koordinasi, kesenjangan digital dan lemahnya pengaturan.</p>
--	---	--

Sumber: hasil kajian penulis, 2021

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Sistem pemerintahan yang demokratis, memberikan perubahan ditatanan kehidupan baik masyarakat maupun untuk pemerintah itu sendiri. Hal tersebut memacu pemerintah untuk mengupayakan kelancaran komunikasi antara *stakholder*, masyarakat dengan pemerintah. Sehingga apresiasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung dan kontribusi atau partisipasi publik juga dapat terjalin .

Dengan adanya berbagai permasalahan akan kondisi pemerintah saat ini, mengakibatkan masyarakat menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan tatanan pemerintahanya yang baik *good governance* secara konseptual kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapain tujuan nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuaj tersebut.²¹

²¹ Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju

Oleh sebab itu, sistem merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Sehingga dalam menunjang *good governance*, maka upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengimplemantasikan sistem informasi manajemen dengan memanfaatkan *e-government*. Karena pada dasarnya teknologi informasi berguna untuk alat penunjang dalam operasional sebuah instansi. Pentingnya penerapan *e-government* juga diuraikan dalam intruksi presiden no 3 tahun 2003 yaitu :

Pemerintah harus segera melakukan proses tranformasi menuju *e-government*, melalui proses tranformasi tersebut pemerintah dapat mengoptimal kan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan intansi-intansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan public yang harus di sediakan oleh pemerintah.

Maka dengan adanya penerapan *e-government* ini pemerintah dapat menata sistem manajemen, pelayanan dan proses kerja pada pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian teknologi memiliki peranan yang penting dalam mengefektifkan seluruh kegiatan pemerintah. Pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan menjadi konsep *e-government* sangat penting dan harus diimplementasikan dengan baik sebagai factor pendukung yang dapat mempengaruhi terselenggaranya pelaksanaan tata kelola pemerintah. *E-government* juga bertujuan memberikan layanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi public dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sedarhana, serta sistem *e-government* juga bertujuan untuk mendukung *good governance*.

Pemanfaatan sistem informasi yang di kembangkan menjadi *e-government* sangat penting dan harus diterapkan dengan baik sebagai sector pendukung yang mempengaruhi terselenggaranya pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Hal ini karena dalam sistem *e-government* maupun tata kelola pemerintah, kedua aspek tersebut mencerminkan adanya pengaruh dalam upaya peningkatan pelayanan public, efektif dan efisien kerja pemerintah.²² Dengan demikian adanya *e-government* apakah pemerintah selevel Desa sudah siap menerapkan *e-government* sehingga dapat berdampak terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Gambar 2.3 Kerangka Penelitian



Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Dari gambar tersebut dapat di paparkan *e-government* sebuah perkembangan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berbasis elektronik, dan apakah pemerintah Desa sudah siap dalam mengimplemtasikanya. Tak bisa di pungkiri juga bahwa dalam pelaksanaan *e-*

²² Indrajit, Richardus Eko . 2002. Electronic Government:Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi

government di Desa banyak permasalahan yang harus di selesaikan. Mengingat sangat sulitnya dalam penerapan *e-government* di Desa perlu membenah seperti infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mengaplikasikanya, sehingga dengan menerapkan sistem *e-government* di Desa maka bisa menciptakan tranfaransi, akuntabilitas efisiensi dan efektivitas, pelayanan informasi, Berita Desa dan bisa menjalin informasi berbasis eletronik kepada masyarakat Desa Sungai Baru.

2.4 KONSEP OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah meletakkan arti pada suatu konstruk atau variabel dengan menetapkan kegiatan kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu. Definisi Operasional menjabarkan pengertian suatu konsep yang abstrak dengan menurunkan pada tingkat yang kongkrit (lebih nyata) agar konsep tersebut dapat di ukur secara empiris.²³

Penulis disini akan menjelaskan aspek penting menilai sejauh mana kesiapan pemerintah dalam penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru dengan tujuan meningkatkan penyelenggara pemerintahan desa berbasis informasi manajemen. Dengan hal tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

²³ Hamidi. M.Si. 2010. Metode penelitian dan Teori Komunikasi. Malang: UMM Press

1. Pemerintahan dalam *e-government*

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *e-government*. Melalui *e-government* pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud.

2. *E-government*

E-government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian *E-Government*, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet sebagai alat bantu. Kemudian yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Ketersediaan informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, tentu akan membuat sistem pemerintahan lebih baik.

3. Pengembangan *e-government*

Pengembangan *E-Government* berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk

mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi *E-government*.

Adapun Konsep operasional dari penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari Suksesnya pengembangan *e-government* bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses²⁴. Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset oleh *Harvard JFK School of government* meliputi *support* (dukungan), *Value* (nilai) dan *Capacity* (kemampuan). Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dukungan/suport

Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan politis) untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari e-government. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (action). Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus.

²⁴ Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi

2. Kemampuan/*Capacity*

Kemampuan/*Capacity* adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan “impian” e-government terkait menjadi kenyataan.

3. Nilai/*Value*

Elemen pertama dan kedua diatas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-*supply side*). Pelaksanaan e-government tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-*demand side*). Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa memilih prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) secara signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Perpaduan antara ketiga elemen diatas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan e-government) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan *e-government*.

2.5. OPERASIONAL VARIABEL

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Dari pengertian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan variabel penelitian *e-government* sebagai berikut:

Tabel 2.3. Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3	4
<p><i>e-government</i> adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Indrajit, dkk. (2006)</p>	<p>Penerapan <i>e-government</i> di Desa</p>	1. Dukungan/support	<p>1. Keinginan seorang pemimpin dalam menerapkan sistem <i>e-governmrnt</i></p> <p>2. Payung hukum yang mengatur dengan jelas tentang penerapan <i>e-government</i>.</p> <p>3. Pemerintahan Desa mampu memberikan berbagai bentuk inovasi <i>e-government</i></p>
		2. Kemampuan/capacity	<p>1. Kondisi infrastruktur sarana pendukung.</p> <p>2. Kecakapan kapasitas Petugas (SDM) dalam menjalankan <i>E-Government</i> Desa</p> <p>3. Ketersediaan anggaran merupakan dukungan yang besar untuk mengembangkan <i>e-government</i> Desa</p>
		3. Nilai/Value	<p>1. Manfaat aplikasi Siskeudes</p> <p>2. Manfaat aplikasi Sipades</p> <p>3. Manfaat <i>Website</i> Desa</p>

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

²⁵ Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.²⁶

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang²⁷. menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun penetapan lokasi penelitian dilakukan pada Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. peneliti tertarik untuk melakukan

²⁶ Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.

²⁷ Moh. Nazir. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

penelitian disini karena *e-government* sangat diperlukan dalam mempermudah pekerjaan baik dalam administrasi dan pelayanan informasi Desa. Disamping itu juga dengan penerapan *e-government* dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, penerapan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi *e-governmrnet* yang diterapkan oleh pemerintah. Keberadaanya tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah.

3.3 Informan

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian²⁸. Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara *porposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Dimana informan dijadikan sumber informasi yang mengetahui tentang masalah penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, dengan pertimbangan mereka paling mengetahui informasi yang akan diteliti.

²⁸ Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Budi N Pamungkas, S.STP., M.Si	Kadis PMD	Informan
2.	Yuliargo, Sp.,M.AP	Camat	Informan
3.	Catra hidayat, SE	Kepala Desa	Key Informan
4.	Peni Purmanda, SE	Sekretaris	Informan
5.	Fatimah Wati	Kaur Umum	Informan
6.	Yulianti	Ketua BPD	Informan
7.	Gusdi Afrianto	Operator	Informan
8.	Joko Irawan, S.Pd	Staf Umum	Informan
9.	lisna	Masyarakat	Informan
10.	junaidi	Pemuda	Informan
Jumlah 10 Orang			

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ada dua jenis sumber dan jenis data peneliti adopsi, adapun sumber dan jenis data yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti ²⁹. Data primer ini khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang

²⁹ J.Moleong, Lexy.2014. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

berjalan. adapun data yang diperoleh peneliti dalam mengumpulkan data primer di Desa Sungai Baru menggunakan metode survei (*survey method*), metode survei (*survey method*) merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan Wawancara (*Interview*) dan Angket.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini peneliti peroleh dari berkas Kantor Desa Sungai Baru, perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.³⁰

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.³¹

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

³⁰ Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

³¹ Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung terhadap responden mengenai masalah penelitian, Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan alat-alat yang digunakan adalah pedoman wawancara. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview) Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview) dimaksudkan bahwa jenis wawancara ini adalah untuk menentukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak pemerintahan Desa diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa dikemukakan oleh informan.³²

2. Observasi

Serangkaian pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (Readibilitas) dan kesahihanya (validitasnya) adapun jenis observasi yang digunakan peneliti ialah *Observasi Tersetruktur* dimana observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. jadi observasi tersetruktur dilakukan apabila

³² Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang diamati. dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrument penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan atau pasal-pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah.

4. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Teknik ini disebut juga dengan studi pustaka yaitu cara menelusuri kepustakaan yang berisi tentang teori-teori dari karya ilmiah baik yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan berupa *hard copy* atau *soft copy* yang ada pada buku-buku *e-books*, makalah, jurnal *online*.³³

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung,

³³ Danial dan Wasriah. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel/dapat dipercaya.³⁴

Langkah – langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu;

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berkenaan dengan Kesiapan Desa Sungai Baru Dalam Penerapan *e-Government*, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan

³⁴ Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7 Rancangan Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis adalah gambaran umum secara terinci dan spesifik mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah proposal tesis. Terdiri dari :

BAB I Pendahuluan: Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas jelas, dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi proposal tesis meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Oleh karena itu, bab ini akan meliputi uraian tentang.

BAB II Kajian Kepustakaan: dalam Bab ini dikemukakan dengan umum, ringkas, jelas, dan objektif tentang konsep teori, ulasan

karya, kemudian mengurangkan kerangka pemikiran, konsep operasional, dan operasional variabel dan menyatakan hipotesis.

BAB III Metode penelitian: dalam Bab ini diuraikan tentang: Tipe penelitian; lokasi penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; teknik analisis data.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian merupakan perencanaan waktu pelaksanaan penelitian yang dibuat berdasarkan tahapan penelitian oleh peneliti, adapun jadwal penelitian peneliti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Ke				
		September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Persiapan dan Penyusunan Penelitian	■	■			
2	Seminar Usulan Penelitian			■		
3	Riset				■	
4	Peneliti Lapangan				■	
5	Pengolahan dan Analisis Data					■
6	Konsultasi Bimbingan Tesis					■
7	Ujian Tesis					■

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Identitas Informan

Sebelum membahas lebih lanjut, maka perlu di kemukakan gambaran Identitas informan yang akan yang membantu dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini. Informan yang dapat peneliti dipilih yang berdasarkan Identitas yang paling tahu mengenai penerapan e-government di Desa. Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintahan Desa Sungai Baru dengan objek sasaran penelitian yaitu mengenai Penerapan *E-government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Informan dalam penelitian ini berjumlah Sepuluh orang untuk diwawancarai dalam penelitian berkenaan dengan masalah yang diteliti dimana profil informan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Identitas Informan

Kode	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia
1	2	3	4
1.	Laki-laki	S2	50
2.	Laki-laki	S2	47
3.	Laki-laki	S1	34
4.	Laki-laki	S1	28
5.	Laki-laki	S1	29
6.	Perempuan	S1	30
7.	Perempuan	SMP	39
8.	Perempuan	SMP	50
9.	Laki-laki	SMP	24
10.	Laki-laki	SMA	23

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Tabel diatas menjelaskan kualifikasi Profil informan yang berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia merupakan sumber dalam memperoleh penelitian berkenaan dengan masalah yang diteliti.

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.2.1 Profil Desa

Secara Administratif Desa Sungai Baru termasuk dalam Wilayah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak dibagian Barat merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi berkembang di dukung oleh Infrastruktur Desa Sungai Baru dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dengan persawahan luas yang dialiri oleh sungai yaitu sungai Indragiri dengan beberapa anak Sungai.

Gambar 4.1 Peta Desa



4.2.2 Sejarah Desa

Pada jaman dahulu Desa Sungai Baru berupa hutan. Suatu ketika datang seorang pemuda yang bernama Ludin M. Amin. Pemuda ini berasal

dari Tanjung Pinang (Ibu Kota Kepri). Ludin menebang hutan dan membuat parit untuk sarana irigrasi, parit ini disebut parit baru. Beberapa tahun kemudian, datanglah masyarakat yang ingin bertempat tinggal di parit baru ini. Semakin tahun penduduk parit baru semakin ramai, hingga berkembang menjadi 15 parit.

Karena penduduk yang ramai, parit baru dibentuk lah seorang wakil parit (penghulu). Setelah dilakukan musyawarah, maka ludin dan m. Amin sebagai wakil parit baru. Setelah beberapa tahun menjadi wakil parit, keadaan dan kesehatan Ludin pun sudah mulai tidak efektif lagi dikarenakan sudah tua. Maka masyarakat menunjuk husen yang juga penduduk parit baru itu sendiri. Kepemimpinan husen berakhir dan digantikan dengan Atan Maen bin Dol. Selang beberapa tahun wakil parit pun digantikan dengan Main bin Nawang. Cukup lama main menjadi wakil parit baru ini, sejak awalnya memang sudah ada kemajuan diparit baru ini dan penduduknya pun semakin banyak. Karena faktor umur yang tua, maka Main digantikan dengan Putih. Putih menjadi wakil parit hanya beberapa bulan saja dan diganti lagi dengan Badrun Bin Ludin.

Pada masa Badrun menjadi wakil parit, parit baru dimekarkan menjadi Desa, yang diberi nama Desa Sungai Baru ini terjadi pada tahun 1988. Desa Sungai Baru yang berkecamatan di kecamatan GAS (Gaung Anak Serka) dengan Kepala Desa Badrun Bin Ludin dan sekdes Sakrani. Beberapa tahun berlalu dan sudah banyak pembangunan yang sudah dilakukan. Pada tahun 1992, berakhir masa Badrun bin Ludin dan dipilih

Kepala Desa yang baru yakni Zainuti Terjadilah pemekaran Kecamatan Gaung(tahun 1996) dan sungai baru merupakan desa diwilayah kecamatan Gaung. Delapan tahun kepemimpinan Zainuti maka dilakukan pemilihan kepala desa yang baru, dengan calon terpilih adalah Amadi bin Mahmur. Kepemimpinan Amadi bin Mahmur berlanjut 2 periode. Kepemimpinan Amadi mahmur digantikan dengan kepala desa yang baru Catra Hidayat bin Anwar periode 2017 sampai 2023.

4.2.3 Letak Geografis

Secara Dgeokrafis Desa Sungai Baru terletak dibagian barat Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang **1.270 H** dan dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Soren
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei Iliran
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jerambang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lahang Baru

4.2.4 Demografi

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Bukan hanya dengan jumlah yang besar saja tetapi kualitas yang baik lebih berguna dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara umum. Jumlah penduduk di Desa Sungai Baru pada Tahun 2021 berjumlah 787 Jiwa dan dapat dilihat pada tabel bawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

No	RW	RT	Jumlah KK	Jumlah	
				Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1	RW 1	RT 001	36	55	48
2		RT 002	28	43	45
3		RT 003	36	46	59
4		RT 007	33	45	53
5	RW 2	RT 004	32	60	42
6		RT 005	30	48	59
7		RT 006	35	56	58
8		RT 008	16	38	32
Jumlah 787 Jiwa			246 KK	391	396

Sumber: Pemerintahan Desa Sungai Baru

4.2.5 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Sungai Baru

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Desa Sungai Baru Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) maka dapat diuraikan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Kerja Pemerintahan Desa Sungai Baru sebagai berikut:

1. Kepala Desa

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perDesaan, dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan kelembagaan masyarakat.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Kepala Desa berwenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
 - d. menetapkan Peraturan Desa
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Sekretaris Desa

(1) Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dalam program kerja pemerintahan Desa;
- b. pengkoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
- c. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. menyelenggarakan Kesekretariatan Desa;
- e. menjalankan administrasi Desa;

- f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Desa;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga dan perawatan sarana dan prasarana fisik Pemerintah Desa ; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Desa;
 - c. pelaksanaan urusan personalia Perangkat Desa;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Desa;
 - e. pelaksanaan pelaporan keuangan Desa;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan Desa;
 - g. pengelolaan perpustakaan Desa;
 - h. pengelolaan aset Desa; dan
 - i. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Umum

- (1) Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:
- a. melakukan urusan surat menyurat;

- b. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;
- c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa;
- d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa;
- e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan diluar Urusan Umum yang diberikan oleh Kepala Desa; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah Desa;
- b. melaksanakan urusan barang inventaris Desa;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Desa; dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

4. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

(1) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDes, serta penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa secara rutin dan/atau berkala;

- c. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- d. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
- e. melaksanakan Musrenbang Desa;
- f. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
- g. mengendalikan pelaksanaan APBdes;
- h. mengelola dan membina administrasi keuangan Desa;
- i. menggali sumber pendapatan Desa;
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan diluar Urusan Perencanaan dan Keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- l. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - m. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - n. penyusunan program kerja pemerintahan Desa;
 - o. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - p. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - q. pengendalian dan evaluasi;

- r. penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- s. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran;
- t. fasilitasi kesekretariatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- u. pelaksanaan penyusunan rancangan APB Desa;
- v. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Desa;
- w. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan Desa;
- x. pelaksanaan pungutan Desa; dan pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. melaksanakan administrasi kependudukan;
- c. melaksanakan administrasi pertanahan;
- d. melaksanakan pembinaan social politik;
- e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa;
- f. menyelesaikan perselisihan warga; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- f. fasilitasi kerja sama Pemerintah Desa; dan penyelesaian perselisihan warga.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

(1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Tugas operasional di bidang kesejahteraan dan Pelayanan meliputi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa;
- c. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
- d. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana Pendidikan;
- e. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana Kesehatan;
- f. sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup;
- g. melaksanakan pembinaan di bidang kesehatan, Keluarga Berencana, pemberdayaan keluarga dan pendidikan masyarakat;
- h. Pembinaan kepemudaan, olah raga dan karang taruna;
- i. melaksanakan administrasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan rakyat;
- k. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- l. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

- m. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang partisipasi masyarakat, sosial budaya, keagamaan, ketenagakerjaan, pertanian dan perkebunan;
- n. menyiapkan dan mengusulkan pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
- o. mengkoordinasikan kegiatan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- p. pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Desa;
- q. pembinaan kegotong royongan dan bakti sosial;
- r. melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
- s. melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- t. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;
- u. membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan pengurusan jenazah;
- v. melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama
- w. melaksanakan pendataan tempat ibadah, lembaga keagamaan, kelompok pengajian, dan lainnya guna keperluan pembinaan;
- x. menyelenggarakan administrasi dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan;
- y. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan;
- z. melaksanakan urusan pertanian dan perkebunan di Desa

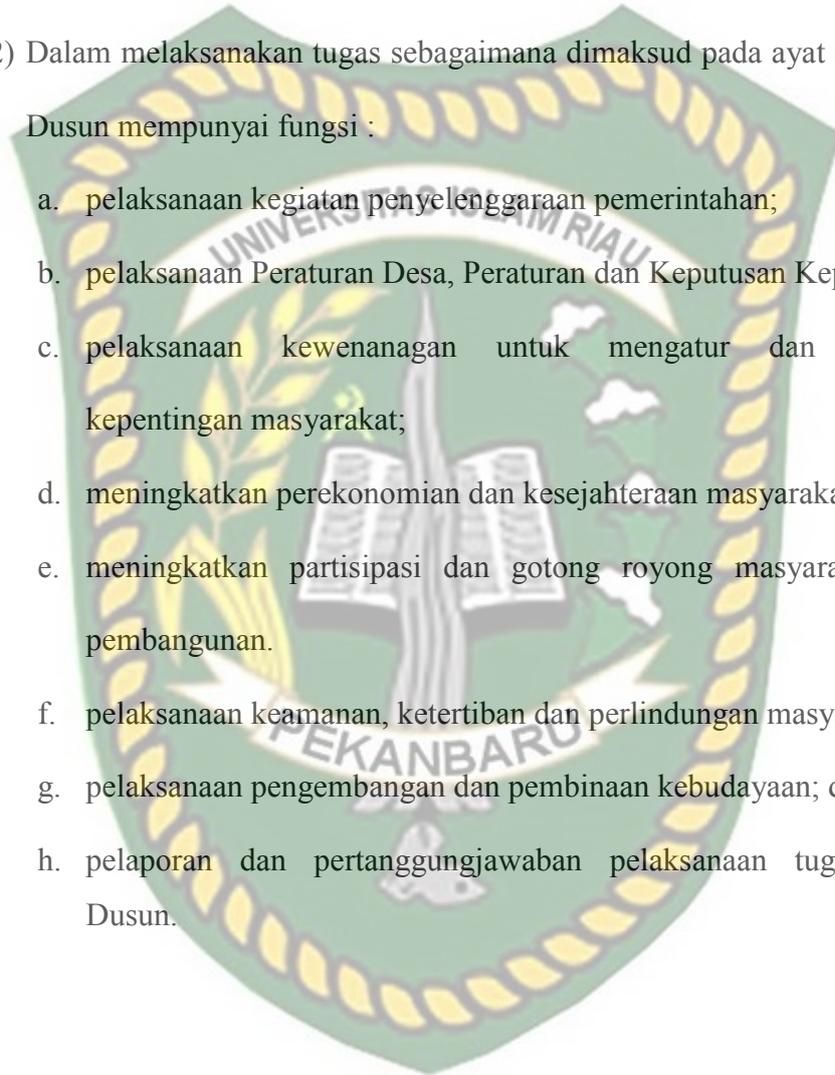
- aa. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan;
- bb. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengairan Desa;
- cc. mengoordinasikan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah Desa
- dd. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pertanian dan perkebunan;
- ee. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan
- ff. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- gg. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

7. Kepala Dusun

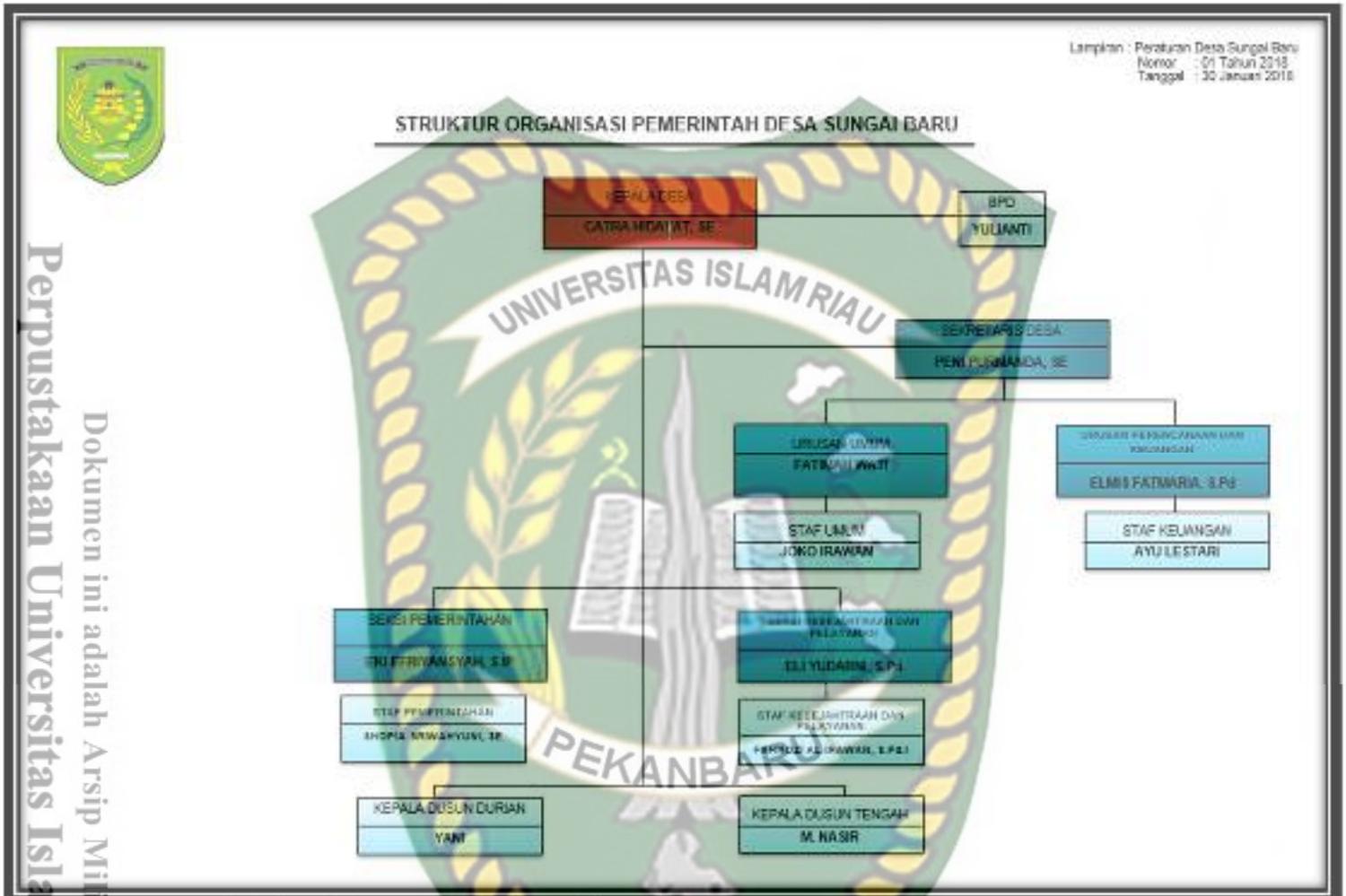
(1) Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah Dusun yang dipimpinnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;
- c. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;
- d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- e. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Desa dan di wilayah Dusun;

- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil dibidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
 - d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
 - f. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dusun.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Baru



Sumber : Pemerintah Desa Sungai Baru

4.3 Penerapan *E-Government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Penerapan *E-Government* pada Pemerintahan Desa Sungai Baru dimaksudkan untuk mengetahui serta mendeskripsikan keberhasilan dari penerapan *e-government* tersebut pada Pemerintahan Desa Sungai Baru. Penerapan *E-Government* di Desa Sungai Baru menggunakan tipe *Government to Government* dan *Government to citizen*. Pertama, *Government to Government* yang memiliki kebutuhan berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya demi memperlancar kerjasama dan proses kerja yang berkaitan dengan Keuangan, Aset dan Data Penduduk. Kedua *Government to citizen* merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat melalui kanal akses seperti *Website* Desa.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dengan dimensi dan beberapa indikator yang akan menjadi alat analisis peneliti dalam penelitian ini ialah sesuai dengan aspek penting Elemen-Elemen Sukses Pengembangan *E-Government* meliputi *support* (dukungan), *Value* (nilai) dan *Capacity* (kemampuan).³⁵

³⁵ Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi

4.3.1 Dukungan/*Support*

Kata *support* adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki *political will* (keinginan politis) untuk mengembangkan *e-government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *e-government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya (*action*). Tanpa adanya unsur *political will*, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan mulus. Adapun sub indikator dukungan/*support* yaitu:

1. Keinginan Pemimpin Dalam Menerapkan *E-Government*

Penerapan *e-government* memerlukan kepemimpinan politik yang sangat kuat untuk mencapai perubahan itu sendiri. Perlu adanya dukungan dan komitmen dari pemimpin dalam mengalokasi sehal sumber daya yang dimiliki. dengan begitu dibutuhkan pula keahlian yang mampu memberikan perubahan saat mampu memotivasi seluruh anggotanya untuk berubah dan berinisiatif dalam menerapkan *e-Government* melalui segala langkah yang diperlukan. Salah satu cara pemerintah dalam menerapkan dan mengembangkan *e-government* dengan pendekatan kepemimpinan adalah membentuk suatu lembaga yang tidak hanya memiliki keahlian melainkan juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan perubahan. Mengenai faktor kepemimpinan yang menjadi faktor sukses penerapan *e-Government* terletak pada pemimpin yang menjalankan *e-government*. dibutuhkan

kepemimpinan yang mampu melaksanakan *e-government* dari awal hingga akhri dengan penuh tanggung jawab.³⁶

Kepemimpinan Kepala Desa Sungai Baru membantu melahirkan sebuah terobosan untuk menjalankan visi misi bersama Perangkat Daerah yaitu dinas PMD sebagai pendorong terbentuknya inovasi untuk mengembangkan Penerapan *E-Government* di Desa. Ditandai dengan adanya aplikasi-aplikasi *e-government* bersipat *offline/online* di Desa Sungai Baru di antaranya telah dilaksankanya penerapan aplikasi SISKEUDES aplikasi SIPADES dan *Website* Desa. Berdasarkan wawancara bersama Kadis PMD Budi N Pamungkas, S.STP., M.Si dan Kepala Desa Sungai Baru Catra Hidayat, SE, terkait keinginan pemimpin dalam mengembangkan *e-governmant* dapat di jelaskan sebagai berikut:

Untuk inovasi yang ada di desa kecamatan gaung khususnya Desa Sungai Baru, itu merupakan langkah awal kami dari dinas untuk mengembangkan *e-gov* di Desa. Memang infrastruktur seperti jaringan tidak semua di desa memiliki, setidaknya ini langkah awal untuk menerapkan suatu sistem bersipat elektronik di desa, semua itu butuh proses ki.. kami juga berharap dapat memaksimalkan sistem elektronik di desa dan dapat membentuk pemerintahan desa berbasis eletronik di indragiri hilir dan ini kegiatan jangka panjang ki.. saya juga senang pemerintah desa bersedia menganggarkan untuk sistem-sistem yang kami dorong untuk pemerintah desa terapkan. saya berharap beberapa tahun kedepan semuanya sudah berjalan dengan baik. 16/03/2023³⁷

³⁶ Indrajit, Richardus Eko . 2002. Electronic Government:Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi
³⁷ Budi N Pamungkas, S.STP., M.Si, 50 Tahun Tingkat Pendidikan S2 Jabatan Kepala Dinas PMD

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa, dinas PMD merupakan penggerak inovasi terkait pengembangan e-government di desa-desa yang ada di kecamatan gaung khususnya pemerintahan desa sungai baru, tapi inovasi yang ada di desa khususnya dalam pelaksanaan aplikasi/kanal akses yang sudah online ini baru pada tahap persiapan dan perlu di perhatikan lagi seperti infrastruktur teknologi seperti jaringan yang tidak semua desa memiliki jaringan. Proyek e-government di desa masih pada tahap awal dan masih dalam perkembangan.

Berikut pula yang di kemukakan oleh Bapak Catra Hidayat, SE dijelaskan bahwa :

Bahwa penerapan *e-government* sudah ada di desa pada tahun 2018 sejak mulai terbit aplikasi siskeudes dalam pelaksanaan keuangan desa. Pemerintahan desa sangat antusias menerima aplikasi tersebut. Pada tahun selanjutnya tahun 2019 Dinas PMD mengintruksikan untuk desa menganggarkan website desa. Pada tahun 2021 satu aplikasi yaitu aplikasi SIPADES hadir di pemerintahan desa sungai baru ini. Saya sangat senang dengan hadirnya aplikasi-aplikasi tersebut mengingat dengan jaman yang sudah modern pelayanan dan sistem kerja perangkat desa pun sudah berinovasi. Saya selaku kepala desa sangat mendukung dengan penerapan *e-government* di desa karna inovasi tersebut sejalan dengan apa yang saya harapkan. 16/11/2021³⁸

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa, pemerintahan desa sangat antusias dalam penerapan *e-government* dapat dilihat dari keikutsertaan pemerintahan desa dalam mewujudkan aplikasi-aplikasi yang ada didesa.

³⁸ catra hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Kepala Desa Sungai Baru

Berikut pula yang di kemukakan oleh Bapak Camat Gaung Yuliargo SP,. M.AP dijelaskan bahwa:

...“Penerapan *e-government* atau pelaksanaan kegiatan berbasis digital pastinya tidak lepas dari kemauan dari pimpinan kepala desa dalam memberikan sebuah inovasi untuk memudahkan dan mempercepat perangkat dan stafnya dalam bekerja, dan juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan layanan sistem informasi desa misalnya” (16/11/2021)³⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat di analisa bahwa penerapan *e-government* di desa tidak lepas dari kemauan dari Pimpinan Kepala Desa Sungai Baru dalam memberikan fasilitas untuk memudahkan dan mempercepat sistem kerja Perangkat Desa dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Unsur kepemimpinan Kepala Desa Sungai Baru sudah baik dalam mengembangkan *e-government* dilihat dari keikutsertaan dalam melahirkan sebuah terobosan untuk menjalankan Visi Misi bersama Perangkat Daerah untuk mengembangkan Penerapan *E-Government* di Desa.

Data yang diperoleh berdasarkan observasi dilapangan bahwa pada tanggal 16/11/2021 waktu 10.00 wib di Ruangan Kepala Desa bahwa kepala Desa sungai baru sudah memiliki keinginan dalam penerapa *e-government*. Ditandai dengan adanya aplikasi-aplikasi *e-government* di Pemerintah Desa. Selanjutnya dari hasil pengamatan peneliti saat observasi bapak yuliargo SP, M.AP pada tanggal 17/11/2021 waktu 13.00 wib di Kantor Camat Gaung yaitu bahwa sudah diketahui adanya inovasi di

³⁹ Yuliargo, 47 Tahun Tingkat Pendidikan S2 Jabatan Camat Gaung

di desa yang ada di kecamatan gaung dan untuk menerapkan *e-government* di Desa perlu keinginan seorang pemimpin/kepala desa dalam menerapkan *e-government*

2. Payung Hukum yang Mengatur Dengan Jelas Tentang Penerapan *E-Government*.

Pengimplementasikan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya telah ditunjang oleh keberadaan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional, meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *e-government*. Pengembangan *e-Government* di setiap instansi harus selaras dengan regulasi. Dapat dilihat pada Tabel di bawah ini mengenai dasar *e-government* :

Tabel 4.3. Regulasi Pendukung Penerapan *E-Government* Provinsi Riau

No	Payung Hukum
1.	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i>
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik
3.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4.	Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan
5.	Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau

Sumber: <https://www.riau.go.id/>

Dalam penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru terdapat regulasi pendukung dalam penerapan aplikasi SISKEUDES, aplikasi SIPADES dan *Website* Desa, untuk mudah dipahami disini peneliti merangkum berupa tabel-tabel yang berisi regulasi pendukung *e-government* di Desa Sungai Baru.

Tabel 4.4 Regulasi Pendukung Penerapan *E-Government* di Desa

Application	Regulation
1	2
SISKEUDES	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government - PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. - Permendagri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. - Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. - Pasal 25 PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. - Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
SIPADES	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa - peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa"
<i>Website</i>	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa - Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 20 Tahun 2018 Tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Bedasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sungai Baru mengenai regulasi pengelolaan *e-government* di Desa beliau mengungkapkan bahwa:

“Untuk penerapan e-gov di desa sungai baru ini baik berupa inovasi aplikasi dan kanal akses atau website untuk peraturanya saya pun kurang mengetahui dan apalagi peraturan di tingkat daerah. Kami di pemerintah desa hanya menerima intruksi untuk menjalankan aplikasi tersebut” (17/11/2021)⁴⁰

Hal senada juga di jelaskan oleh ketua BPD Desa beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“ Untuk peraturan dasar aplikasi pelaksanaan aplikasi-aplikasi di desa saya tidak mengetahui gimana bentuk peraturanya tapi setidaknya dengan adanya aplikasi tersebut bisa membatu perangkat

⁴⁰ Catra Hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Selaku Kepala Desa Sungai Baru

desa mempermudah menyimpan data dan mempermudah baik hal dalam bekerja”(17/11/2021)⁴¹

Berdasarkan dari yang di sampaikan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD dapat di analisa sebagai berikut, untuk peraturan secara teknis yang mendasari dalam penerapan *e-government* melalui aplikasi SISKEUDes aplikasi SIPADes dan Website Desa untuk peraturan daerah belum ada masih mengacu pada peraturan secara nasional, dan untuk perda Kabupaten Indragiri Hilir juga belum ada yang mengatur secara jelas tentang penerapan *e-government* di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Bapak Kepala Desa Catra Hidayat, SE di Kantor Desa 16/11/2021 waktu 11.00 WIB dapat diamati bahwa secara regulasi Kepala Desa tidak mengetahui regulasi penerapan *e-Government* yang ada di Desa . Selanjutnya Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat observasi bersa Ibu BPD Yulianti SE di Kantor BPD 17/11/2021 waktu 13.30 WIB bahwa dapat peneliti amati terkait regulasi penerapan *e-government* di desa ketua BPD-nya belum mengetahui peraturan yang mengatur dengan jelas tentang penerapan *e-government* di desa untuk peraturan daerah nya juga tidak ada.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa pelaksanaan *e-government* di Desa Sungai Baru belum adanya regulasi di tingkat pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pelaksanaan teknis

⁴¹ Yulianti, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Selaku Ketua BPD Desa Sungai Baru

berpedoman terhadap instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

3. Pemerintah Desa Mampu memberikan Berbagai Bentuk Inovasi *e-Government*

Pemerintahan Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan ditingkat desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakatnya berbasis *electronic government/e-government* (teknologi informasi pemerintahan). Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pemerintah desa dituntut untuk mempersiapkan kemampuan perangkat desa dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat agar tercipta desa yang mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Desa mandiri merupakan cerminan masyarakat desa yang memiliki kemauan yang kuat untuk maju, menghasilkan produk yang memiliki kekhasan desa/lokal yang membanggakan desa, serta desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penerapan *e-government* di Desa merupakan suatu program berbentuk perangkat lunak (*Software*) yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna dan bermanfaat untuk membantu berbagai kegiatan dalam proses kerja dan sistem ini bertugas untuk mengelolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah informasi yang

bermanfaat untuk penggunaannya. Adapun bentuk inovasi *e-government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5. Bentuk Inovasi *e-Government* Desa

No	Nama Desa	Inovasi Aplikasi Desa
1.	Pemerintahan Desa sungai baru	
2.		
3.		

Sumber: Pemerintahan Desa Sungai Baru 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat di jelaskan bahwa bentuk inovasi *e-Government* di Desa Sungai Baru meliputi, Aplikasi SISKEUDES, Apliaksi SIPADes dan *Website* Desa.

a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SISKEUDES)

Tabel 4.6 Modul Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SISKEUDES)

Modul	PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Aplikasi Fungsi	DESA
Klasifikasi	Bentuk Aplikasi : <i>Offline</i> Jenis Layanan : <i>Back office</i> “orientasi pungsinya lebih banyak ditunjukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan“ Objek Layanan : G2G
Fungsi	Sistem ini membantu Desa dalam melaksanakan tugas meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan.
Pengembangan aplikasi	<input type="checkbox"/> BPKP
Organisasi	<input type="checkbox"/> DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) <input type="checkbox"/> Pemerintahan Desa Sungai Baru
Integrasi	<input type="checkbox"/> Aplikasi SISKEUDES , Modul Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Data Olahan Sistem Aplikasi SISKEUDES Desa Sungai Baru Berdasarkan Blue Print e-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah, 2017

Pelaksanaan aplikasi SISKEUDES di pemerintahan Desa Sungai Baru sudah sudah berjalan selama kurun waktu tiga tahun. Sebelum aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diluncurkan, Pemerintah Desa Sungai Baru membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan *Microsoft Excel* atau aplikasi lain yang formatnya tidak standar. Hal ini menyulitkan Pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan

desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (BPKP). Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) awalnya dilakukan untuk menindak lanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki peluang yang besar untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sungai Baru sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Pengimputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada dan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. dalam aplikasi siskeudes terbagi atas 4 (empat) tahapan penginputan yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Perencanaan yang dimaksud ialah tahapan atau proses perencanaan sampai dengan keterhubungan dengan aplikasi sikeudes.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

2. Penganggaran

Pada proses penganggaran, setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. APBDesa merupakan rencanan anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

3. Penatausahaan

Selanjutnya adalah tahap penatausahaan. Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan

terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ke dalam aplikasi sikeudes.

4. Pembukuan/laporan pertanggungjawaban

Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Pemerintahan Desa dalam mempertanggung jawabkan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Adapun prosedur penggunaan dari aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu sebagai berikut:

1. *Log in* ke sistem menggunakan *user ID* dan *password* yang dimiliki Desa sungai baru, halaman login aplikasi siskeudes *Terlampir*
2. Setelah berhasil masuk ke sistem, lalu untuk memasukan data pilih Data Entri, kemudian pilih menu yang tertera. Dalam data entri terdapat 4 menu yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pembukuan. Berikut tampilan program sistem keuangan desa (Siskeudes): Halaman Utama aplikasi siskeudes *Terlampir*

Dalam aplikasi siskeudes terbagi atas 4 (empat) tahapan pengimputan yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan/pertanggungjawaban.

2. Menu perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa . Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dapat dilihat gambar Parameter Perencanaan

Terlampir

Berikut pernyataan peneliti dengan sekretaris Desa Sungai Baru :

“Pada tahap perencanaan itu dimulai dengan musyawarah dengan Tim, mereview RPJMDesa lalu dituangkan menjadi RKPDesa dan selanjutnya diinput ke dalam aplikasi siskeudes” dalam pembuatan RKP desa menggunakan format manual atau *Microsoft word* terlebih dahulu baru menginput ke aplikasi siskeudes”⁴²
18/11/2021

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui pada tahap perencanaan ini Kepala Desa melakukan musyawarah desa dan *review* RPJMDesa

⁴² Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Selaku Sekretaris Desa Sungai Baru

bersama tim RKP untuk merumuskan RKPDesa. Setelah itu baru di input ke aplikasi Siskeudes.

3. Menu penganggaran

Pada prose penganggaran, setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. APBDDesa merupakan rancangan anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APBDDesa merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Dapat dilihat gambar Parameter penganggaran *Terlampir*

Berikut wawancara peneliti dengan sekretaris desa sungai baru terkait penginputan pada tahap penganggaran ke sisitem aplikasi siskeudes:

“ Setelah Perdes APBDDesa ditetapkan baru dilakukan entri data ke dalam aplikasi siskeudes. Biasanya kita juga buat manual terlebih dulu, karena kalau langsung di input ke aplikasi itu cukup memakan waktu yang lama karena harus menginput rincian rinciannya dan juga kalau ada kesalahan penginputan itu juga susah untuk menghapus data yang sudah tersimpan, sedangkan kalau manual bisa kita buat sederhana dulu agar dokumen bisa selesai tepat waktu”⁴³ 18/11/2021

⁴³ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Selaku Sekretaris Desa Sungai Baru

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa proses penganggaran yang dilakukan sungai baru tersebut sudah terstruktur dengan baik dalam hal pengelolaan anggaran dan proses penggunaan dana sudah dapat diketahui karena setelah proses perencanaan lalu dilakukan proses penganggaran yang kemudian di input ke dalam aplikasi siskeudes, namun karena lamanya proses penginputan data menggunakan aplikasi siskeudes karena banyaknya rincian yang harus diisi sehingga dapat menghambat dokumen tersebut selesai pada waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena hal tersebut mereka menyalasi dengan cara membuat dokumen dengan format manual terlebih dahulu agar cepat selesai dan disahkan oleh Kepala Desa, kemudian jika dokumen sudah selesai baru mereka melakukan input ulang di aplikasi siskeudes untuk di posting secara *online* oleh admin kabupaten.

4. Menu Penatausahaan

Selanjutnya adalah tahap penatausahaan. Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ke dalam aplikasi sikeudes. Dapat dilihat gambar Parameter Penatausahaan *Terlampir*

Peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa Sungai Baru terkait dengan penatausahaan menggunakan aplikasi siskeudes :

“Kalau untuk penatusahaan mulai dari penarikan, pengeluaran, belanja di input satu persatu sesuai bidang-bidang yang sudah ada dari belanja pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan juga bidang tak terduga. Tapi penginputan penatausahaan ini hanya sampai pada menu utama saja tidak sampai ke rinciannya”18/11/2021⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses penginputan menggunakan aplikasi siskeudes pada tahap penatausahaan ini sudah dilakukan namun hanya sampai pada menu paling utama saja tidak sampai selesai ke rincian yang paling kecil.

5. Menu Pelaporan/pertanggungjawaban

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua stakeholders pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Pemerintahan Desa dalam mempertanggung jawabkan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dapat dilihat gambar Parameter Pelaporan/pertanggungjawaban *Terlampir*

⁴⁴ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Selaku Sekretaris Desa Sungai Baru

Berdasarkan penyampain sekretaris desa dapat di jelaskan bahwa :

“untuk tahap pelaporan ini harus konek dengan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan untuk SPJnya. Dalam pembuatan pelaporan (spj) kami sudah bisa membuat secara sistem melalui aplikasi siskeudes dan tidak menggunakan manual lagi” 18/11/2021⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses pengerjaan pelaporan bahwa aplikasi siskeudes ini sangat membatu perangkat desa, dengan adanya aplikasi maka pelaporan di kerjakan secara sistematis.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Bapak Sekretaris Desa Catra Peni Purmanda, SE di Kantor Desa 18/11/2021 waktu 09.00 WIB setelah diamanati bahwa memang benar di dalam aplikasi siskeudes terdapat empat tahapan penginputan yaitu perencanaan, penggaran, penatausahaan dan pembukuan/pertanggungjawaban. dan pengerjaan pelaporan sudah secara sistematis tidak secara manual lagi.

Seperti pendapat Bapak Catra Hidayat, SE selaku Kepala Desa beliau berpendapat terkait inovasi siskeudes yang dijalankan pemerintahan desa sungai baru mengatakan bahwa:

.....“Aplikasi sistem keuangan desa merupakan salah satu bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu” 19/11/2021⁴⁶

⁴⁵ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Selaku Sekretaris Desa Sungai Baru

⁴⁶ Catra Hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Selaku Kepala Desa Sungai Baru

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat dianalisa bahwa aplikasi siskeudes sangat membantu perangkat dan mempercepat dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan yang ada di Desa.

Pendapat juga diperkuat oleh Sekretaris Desa Bapak Peni Purmanda,SE yang sekaligus Operator yang menjalankan SISKEUDES yang mengatakan bahwa:

..... “Aplikasi Sistem Keuangan Desa adalah aplikasi yang memiliki berbagai kelebihan terhadap kinerja dari pegawai khususnya saya yang mengoprasikan aplikasi tersebut. Dengan adanya Siskeudes ini saya lebih mudah membuat laporan keuangan desa, karena semua pengerjaan di aplikasi Siskeudes sudah ada, bahkan semua laporan sudah tersedia langsung bisa dilihat bahkan bisa langsung dicetak.” 19/11/2021⁴⁷

Selanjutnya Sekretaris Desa Bapak Peni Purmanda,SE juga menjelaskan:

..... “Sebelum menjalankan siskeudes ini yang perlu kita perhatikan yaitu harus mempersiapkan RABnya baru bisa di masukan ke aplikasi. karna didalam aplikasi sudah ada ketentuannya masing-masing. sudah terselesaikan RAB trus di masukan ke aplikasi. kalau di siskeudes itu memang tidak ada seperti RAB”. 19/11/2021⁴⁸

Kesimpulan dari kedua pendapat informan tersebut bahwa proses pelaksanaan dari aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) ini harus Jika RAB tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam sistem, maka sistem tidak dapat menginput data. tentunya dengan adanya aplikasi ini juga dapat membantu para pegawai dalam bekerja, dimana pegawai akan dituntut

⁴⁷ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Sekretaris Desa Sungai Baru

⁴⁸ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Sekretaris Desa Sungai Baru

untuk bekerja dengan aturan yang telah ditentukan sehingga hasil kerjanya juga semakin baik. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sangat penting adanya karena sangat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Sungai Baru sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Prosedur-prosedur penggunaan Siskeudes pun sudah dilakukan dengan peraturan yang berlaku. Menu-menu pada aplikasi Siskeudes pun dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Bapak Kepala Desa Catra Hidayat, SE di Kantor Desa 19/11/2021 waktu 14.00 WIB s/d selesai dapat peneliti amati bahwa bentuk sebuah inovasi yang ada di desa seperti aplikasi siskeudes ini benar memberikan manfaat kepada pemerintahan desa dalam melakukan pelaporan desa. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti amati bahwa Bapak Sekretaris Desa dan juga sekaligus operator aplikasi Siskeudes Peni Purmanda, SE di Kantor Desa 19/11/2021 waktu 10.00 WIB s/d selesai dapat peneliti amati bahwa aplikasi Siskeudes ini memiliki berbagai kelebihan dapat pengimputan dan pelaporan keuangan Desa dan Aplikasi Keuangan Desa ini sangat mempermudah operator dalam pelaksanaannya.

b. Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADEs)

Tabel 4.7 Modul Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADEs)

Modul	PENGLOLAAN ASET DESA
Aplikasi Fungsi	DESA
Klasifikasi	Bentuk Aplikasi : <i>Offline</i> Jenis Layanan : <i>Back office</i> “orientasi pungsinya lebih banyak ditunjukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan“ Objek Layanan : G2G
Fungsi	melakukan pencatatan administrasi aset tetap desa mulai dari merencanakan, mengadakan, penata usahaan hingga penyampaian laporan lengkap dengan kodefikasi dan labelisasi aset tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya yaitu untuk menertibkan kepemilikan aset dalam upaya meminimalkan resiko kehilangan aset desa dan memberikan kemudahan kepala desa dalam menyajikan laporan aset tetap yang dimiliki kantor desa, serta
Organisasi	<input type="checkbox"/> DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) <input type="checkbox"/> Pemerintahan Desa Sungai Baru
Integrasi	<input type="checkbox"/> Aplikasi SIPADES 2.0 , Modul Pengelolaan Aset Desa

Sumber: Data Olahan Sistem Aplikasi SIPADES Desa Sungai Baru Berdasarkan Blue Print e-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah, 2017

Aplikasi SIPADES merupakan alat bantu Pengelola/Pengurus Barang Milik Desa guna pengadministrasian dan inventarisasi aset Desa sebagaimana amanat Permendagri 1/2016 dan sesuai dengan tupoksi Kaur Umum & TU dalam pasal 7 Permendagri 84/2015. Secara Khusus di Kabupaten Indragiri Hilir. Dapat dilihat tampilan awal aplikasi Sipades gambar *Terlampir*

Pengelolaan Aset Desa diatur Dalam peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa". Penerapan aplikasi SIPADES di Desa Sungai Baru ini baru dilaksanakan tepat pada pada tahun 2021, Dalam mengelola asset Desa Sungai Baru masih mencatat dibuku asset sehingga kurang efisien dalam pencatatan sehingga dibangun sebuah sistem dalam mengelola asset desa sungai baru berbasis aplikasi dan diarsip disimpan didalam database yang dibangun, kapan saja bisa dicetak dan tidak akan hilang. Dengan adanya teknologi yang dapat terkomputerisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan efektifitas waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu informasi.

Kepala desa Catra Hidayat, SE berpendapat terkait hadirnya aplikasi SIPADAS dapat di jelaskan sebagai berikut:

..... Desa kami telah menerima aplikasi SIPADES dari pemerintah daerah saye selaku kades sangat senang karna ini merupakan bentuk inovasi yang berkonsep digitalisasi sehingga bisa memudahkan perangkat saya dalam pelaporan dan mendata asset desa, kalau dilihat jaman kades sebelum saya banyak asset desa yang tak tau kemana itu karena pendataan yang kurang dimaksimalkan. Jadi dengan adanya aplikasi tersebut kedepan kami bisa membenah asset desa kami biar tak mudah data asset tersebut hilang.⁴⁹ 23/11/2021

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat dianalisa bahwa Aplikasi Sipades merupakan bentuk inovasi untuk

⁴⁹ Catra Hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Kepala Desa Sungai Baru

mendata asset Desa agar data asset desa bisa disimpan melalui aplikasi dan tidak mudah hilang.

Pendapat tersebut juga di perkuat oleh operator aplikasi SIPADES

Joko Irwan, S.Pd menjelaskan:

.....“sye selaku pendataan asset dan pelaporan asset sangat terbantu oleh adanya aplikasi tersebut dg adanya aplikasi tersebut agar pendataan aset lebih cepat serta memudahkan pengaksesan aset Desa yang telah diinput.”⁵⁰ 23/11/2021

Kesimpulan dari kedua pendapat informan tersebut bahwa proses pelaksanaan dari aplikasi SIPADES Desa sungai Baru ini sudah berjalan sehingga dengan hadirnya aplikasi tersebut menjadikan Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa dibuat dan disusun dengan harapan dapat terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan Pemerintahan Desa mengenai pentingnya pengelolaan aset Desa yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya kejelasan mengenai penggolongan dan kodefikasi Aset Desa secara nasional yang menjadi acuan bagi Pemerintahan Desa dalam Penataa usahaan Aset Desa yang baku, seragam dan terpadu guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan aset Desa yang lebih efektif dan efisien.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Bapak Kepala Desa Catra Hidayat, SE di Kantor Desa 23/11/2021 s/d selesai waktu 11.45 WIB dapat peneliti amati bahwa aplikasi Sipades ini merupakan aplikasi yang baru di desa dan manfaat aplikasi ini sangat membatu apabila dimaksimalkan, dimana aplkikasi ini berfungsi

⁵⁰ Joko Irawan, 30 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Staf Umum (operator aplikasi Sipades)

sebagai pengelolaan asset desa baik dari penyimpanan data asset dan lebelisasi asset Desa. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat observasi bersama Bapak Joko Irawan, S.Pd di Kantor Desa 23/11/2021 waktu 09.00 WIB s/d selesai peneliti amati dan peneliti menemukan bahwa adanya aplikasi Sipades memang sangat membantu operator dalam pendataan asset lebih cepat serta memudahkan pengaksesan asset yang telah di input apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

c. Website Desa

Tabel 4.8 Modul Website Desa

Modul	PENGELOLAAN WEBSITE DESA
Aplikasi Fungsi	DESA
Klasifikasi	<p>Bentuk Aplikasi : <i>Online</i></p> <p>Jenis Layanan : <i>Front Office</i> “merupakan komponen pemerintah, yang berarti penyedia informasi dan layanan, dan interaksi antara pemerintah dan baik warga negara maupun bisnis. Pendayagunaan <i>e-Government</i> bertujuan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik “</p> <p>Layanan utama : Publikasi Informasi</p> <p>Objek Layanan : G2C</p>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa ➤ meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat Desa
Organisasi	<input type="checkbox"/> Pemerintahan Desa Sungai Baru
Narasi	Mempublikasikan semua informasi umum dan pemerintahan Desa ke seluruh masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan informasi masyarakat
Integrasi	Kanal Akses Pemerintahan Desa (Website Desa)

Sumber: Data Olahan Sistem Website desa Desa Sungai Baru Berdasarkan Blue Print e-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah, 2017

E-government pada Desa Sungai Baru merupakan elektronik pemerintahan berbasis web yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Desa Sungai Baru merupakan Desa yang berada di kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaksanaan layanan berbasis web di pemerintahan Desa sudah berjalan selama tiga tahun. Ini merupakan inovasi yang di kembangkan oleh DPMD kabupaten Indragiri hilir yang se-misi dengan Kepala Desa Sungai Baru.

Kepala Desa berpendapat terkait *website* Desa dapat dijelaskan bahwa:

.....”Mengenai *website* Desa, ini merupakan bentuk inovasi kita yang sejalan dengan misi pemerintah daerah untuk memberikan sebuah wadah layanan informasi sperti *website* desa. Saya sangat senang dengan hadirnya *website* karna ini untuk kemajuan sistem pelayanan informasi kepada masyarakat kami”⁵¹ 25/11/2021

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa dapat dianalisa sebagai berikut, *website* desa merupakan suatu inovasi layanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut memberi kemajuan dalam hal pelayanan.

⁵¹ Catra Hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Kepala Desa Sungai Baru

Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan Bapak Camat Gaung Yuliargo.SP dapat dijelaskan bahwa:

.....“Penerapan website Desa yang ada di kecamatan gaung khususnya desa sungai baru ini, merupakan bentuk tranformasi sistem informasi berbasis web.. ya memang di jaman era dijital pemerintahan desa harus siap untuk membuat sistem informasi secara mudah ya melalui website desa, seperti itu ”⁵² 25/11/2021

Dapat disimpulkan dari penjelasan informan di atas, bahwa penerapan *e-governmnet* melalui *website* Desa di Desa Sungai Baru sudah baik dimana sudah terbentuknya suatu inovasi Sistem Pelayanan Informasi kepada masyarakat, yang perlu di pikirkan kedepan bagaimana pemerintahan Desa mampu memaksimalkan sistem yang ada.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Bapak Kepala Desa Catra Hidayat, SE di Kantor Desa 25/11/2021 waktu 14.00 WIB dapat peneliti amati bahwa inovasi yang ada di desa ini memang sejalan dengan misi pemerintahan daerah yang mana pemerimtahan daerah memfasilitasi penerapan *e-governmnet* di desa. Dengan adanya website desa stidaknya memberi kemajuan pada sistem pelayanan kepada masyarakat walaupun hanya pada pelayanan informasi saja. Berikut hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat observasi bersama Bapak Camat Gaung Yuliargo.SP., M.AP di Kantor Camat Gaung 25/11/2021 waktu 10.45 WIB dapat peneliti amati bahwa website Desa merupakan bentuk tranformasi sistem informasi kepada masyarakat, dengan adanya website di desa-desa khusunya desa sungai baru bisa

⁵² Yuliargo, 47 Tahun Tingkat Pendidikan S2 Jabatan Camat Gaung

memaksimalkan sistem informasi desa melalui kanal akses yang sudah dimiliki oleh desa.

Guna melaksanakan amanat Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, maka pemerintah desa sungai baru melakukan pengembangan *e-government* dengan meluncurkan *website* desa. Dalam penerapan situs berbasis web di pemerintahan desa sungai baru yang dibangun pada tahun 2018 Penampilan dari situs web Pemerintahan Desa Sungai Baru yang beralamat www.sungaibaru.desa.id. Dapat dilihat tampilan awal *website* Desa gambar *Terlampir*

Halaman beranda merupakan halaman pertama ketika situs web Pemerintahan Desa dibuka terdapat beberapa menu-menu yang bisa diakses masyarakat yaitu Menu-Menu Profil Desa, Berita Desa, Lembaga Desa, Layanan dan Peraturan Desa.

Berdasarkan penyampain Kepala Desa kepada peneliti bahwa dijelaskan:

“Penampilan *website* desa sudah kami kemas sedemikian rupa, biar pengguna yang mengakses lebih mudah memahami, dan memang menurut saya banyak yang perlu di perbaiki lagi, dapat saya sampaikan bahwa *website* kami hanya memfasilitasi di layanan *berita saja* belum sampai pada layanan intraksi dan fitur pelayanan kepada masyarakat”⁵³ 25/11/2021

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan, bahwa pemerintahan Desa Sungai Baru selama ini hanya memfasilitasi di layanan

⁵³ Catra Hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Kepala Desa Sungai Baru

informasi seperti Berita Desa. Untuk layanan intraksi kepada masyarakat dan fitur layanan lainya belum dikembangkan pemerintahan desa. Guna melaksanakan tugas dan kewajiban serta sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pemerintah desa sungai baru menyediakan fitur pelayanan pada website desa yang dapat memudahkan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya akan pelayanan publik. Dalam fitur pelayanan tersebut, terdapat hanya informasi seputar berita desa dapat dilihat sebagai berikiut. Dapat dilihat tampilan layanan berita desa gambar *Terlampir*

Situs web pemerintahan Desa Sungai Baru sejauh ini hanya pada layanan berita Desa dan belum pada level intraksi antara pemerintahan desa dengan masyarakat serta belum adanya fitur layanan form surat-menysurat.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Bapak Kepala Desa Catra Hidayat, SE di Kantor Desa 25/11/2021 waktu 14.50 WIB s/d selesai dapat peneliti amati dalam penerapan website desa bahwa pemerintahan Desa Sungai Baru sudah sudah memfasilitasi layanan informasi (Berita Desa) Untuk layanan intraksi kepada masyarakat dan fitur layanan lainya belum dikembangkan pemerintahan desa.

4.3.2 Kemamuan/*Capacity*

Kemampuan/*Capacity* adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan *e-government*. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplementasikan dan membangun *e-government*, yaitu :

1. **Infrastruktur Telekomunikasi**

Dalam level penerapan *e-Government* pemerintahan Desa Sungai Baru, perangkat keras seperti komputer, jaringan dan aplikasi, Infrastruktur ini akan menjadi faktor yang sangat teramat penting dalam penerapan *e-Government*. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas penerapan *e-Government* di Pemerintahan Desa Sungai Baru. Namun secara pragmatis, harus pula di pertimbangkan potensi dan kemampuan atau setatus infrastruktur telekomunikasi di Pemerintahan Desa. Adanya Sumber daya infrastruktur Teknologi Informasi yang dimana ketersediaan infrastruktur ini menjadi 50 % kunci keberhasilan penerapan *e-Government* ini. Dapat dilihat infrastruktur telekomunikasi dan aplikasi yang ada di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir di bawah ini:

Tabel 4.9 **Insfrastruktur Telekomunikasi Pemerintahan Desa Sungai Baru**

No	Nama Desa	Insfrastruktur Telekomunikasi			Aplikasi Perangkat Lunak Desa	Tahun
		Jumlah Komputer /Laptop	Jenis Koneksi Jaringan	Jaringan Internet		
1.	Sungai Baru	5	Tidak ada	Tidak ada	SISKEUDES 	2018
					SIPADES 	2021
					WEBSITE 	2018

Sumber : Pemerintahan Desa Sungai Baru 2021

Tabel diatas dapat digambarkan infrastruktur telekomunikasi yang ada di Pemerintahan Desa Sungai Baru baik dari komputer jaringan internet dan aplikasi. komputer di Pemerintahan Desa hanya 5 unit dipergunakan untuk proses pelayanan masyarakat (*publik services*) pengolahan dan dokumentasi data penduduk dan lainnya di Desa. Sedangkan untuk jaringan internet tidak ada terdapat di Desa Sungai Baru.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Baru menjelaskan bahwa:

.....“Untuk komputer di kantor ini tersedia sebanyak lima unit saja, untuk pelaksanaan sistem aplikasi apliaksi di desa sebenarnya masi

kurang, untuk aplikasi siskeudes sudah ada laptopnya, sipades juga sudah ada website desa ada juga sedangkan untuk jaringan internet ini merupakan masalah yang besar menurut saya, karna ada aplikasi dan website yang harus menggunakan jaringan internet sedang di desa tidak ada koneksi untuk menghubungkan ke aplikasi tersebut”⁵⁴ 29/11/2021

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat dianalisa sebagai berikut, infrastruktur telekomunikasi seperti komputer yang ada di desa sungai baru tersedia lima unit dalam pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan jaringan/*tower* internet tidak dimiliki oleh desa sungai baru.

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Kaur Umum ibu Fatimahwati dijelaskan:

...”Infrastruktur di sini dibilang memadai lah, tapi memang tidak dapat dipungkiri juga untuk ditambah unit komputer/laptop biar tidak bergantian saat melakukan kerja. dan juga untuk fasilitas internet ini yang terkendala di desa, memang untuk jaringan internet memang tidak ada jadi susah mau memasang wifi ki”⁵⁵ 29/11/2021

Penjelasan diatas diperkuat dengan pendapat Kepala Desa Sungai Baru dijelaskan sebagai berikut:

.....“Terkait jaringan yang ada di desa ini tidak baik menurut saya untuk menjalan kan sistem yang sudah *online*, kami bisa dilihat tidak siap dengan hadirnya aplikasi tersebut. Memang untuk jaringan sudah saya upayakan tapi memang belum rezekinya di desa kami ini ada tower jaringan”⁵⁶ 29/11/2021

Dapat disimpulkan dari penjelasan informan di atas bahwa, dalam penerapan *e-government* infrastruktur telokumunikasi menjadi faktor yang

⁵⁴ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Sekretaris Desa Sungai Baru

⁵⁵ Fatimah wati, 42 Tahun Tingkat Pendidikan SMA jabatan Kaur Umun

⁵⁶ Catra Hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Kepala Desa Sungai Baru

sangat teramat penting agar *e-government* di Desa dapat berjalan dengan baik. Untuk komputer di Desa Sungai Baru dalam menjalankan aplikasi-aplikasi sudah baik cuman terdapat satu aplikasi saja masi menggukana Hp dikarenakan memudahkan operator dalam mencari jaringan dangat mengoprasikan aplikasi tersebut. Sedangkan untuk koneksi jaringan internet di Desa Sungai Baru ini memang tidak ada dengan hal ini menyulitkan operator yang menjalankan aplikasi yang sudah *online*.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Sekretaris Desa Bapak Peni Purmanda, SE di Kantor Desa 29/11/2021 waktu 10.00 WIB s/d selesai dapat peneliti amati bahwa terkait infrastruktur telekomunikasi seperti komputer sudah ada di desa untuk jaringan/tower internet belum tersedia lagi di desa sungai baru. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat observasi bersama Kaur Umum Ibu Fatimah Wati di Kantor Desa 29/11/2021 waktu 10.55 WIB peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan kerja di kantor desa terdapat kurangnya komputer dan fasilitas internet yang tidak ada di Desa Sungai Baru, Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Kepala Desa Bapak Catra Hidayat, SE di Kantor Desa 29/11/2021 s/d selesai waktu 11.30 WIB dapat peneliti amati bahwa tidak adanya jaringan internet di desa, membuat pemerintah desa kesulitan dalam memanfaatkan website desa. Dalam pelaksanaan website desa ini harus berada di kawasan yang ada jaringan internet.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas sumber daya khususnya aparatur Pemerintahan Desa Sungai Baru sehingga dengan meningkatkan sumber daya manusia merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dalam penerapan e-government di Desa Sungai Baru. Aparatur Pemerintahan Desa merupakan aktor pemain utama atau subyek di dalam inisiatif *e-government* dan juga mempersiapkan pegawai yang handal dalam bidang pengoprasian aplikasi *e-government* Desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik, dapat dilihat kompetensi pegawai Pemerintahan Desa Sungai Baru dalam mengoprasikan aplikasi ini dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan (Skill).

Tabel 4.10 Kopetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sungai Baru

No	Nama Desa	Tingkat Pendidikan Operator Aplikasi	Aplikasi Desa
1	2	3	4
1.	Sungai Baru	S1 (SE)	Siskeudes
		S1 (S.Pd)	Sipades
		SMA	Website

Sumber: Pemerintahan Desa Sungai Baru 2021

Tabel diatas merupakan tingkat kompetensi SDM di Pemerintahan Desa Sungai Baru dalam menjalankan aplikasi *e-government*, kompetensi SDM di Pemerintahan Desa Sungai Baru ini masih minimnya pengetahuan

dalam bidang teknologi. Tapi di karenakan Pemerintahan Desa sebagai pelaksana dari aplikasi tersebut maka perlu pembinaan dari dari Dinas terkait sehingga bisa dipahamai dan tidak ada kendala dalam menjalankan aplikasi tersebut. Dapat dipahami secara jelas kompetensi pegawai pemerintahan Desa ini berdasarkan wawancara dengan informan di Desa Sungai Baru.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa terkait sumberdaya yang ada di Desa Sungai Baru, dapat dijelaskan:

1. Aplikasi SISKEUDES

.....“Untuk kapasitas SDM terkait pelaksanaan aplikasi-aplikasi di Desa kami ini yang pertama aplikasi Siskeudes memang untuk aplikasi Siskeudes saya sendiri yang mengoprasikanya, seharusnya kaur keuangan yang menjalaknya karna kaur keuangan memang tidak bisa dihandalkan jadi saya sendiri yang mengambil alih dalam pengoprasian aplikasi, sebenarnya jika kaur keuangan ada kemauan untuk belajar rase saye bisa”⁵⁷ 06/12/12

Berdasarkan wawancara dari informan dapat dijelsakan bahwa, untuk pelaksanaan aplikasi siskeudes ini oprasikan oleh Sekretaris Desa, seharusnya pengoprasian di laksanakan oleh Kaur Keuangan.

2. Aplikasi SIPADES

..... Naah !! aplikasi SIPADES ini baru ya ki... hadir di desa, memang aplikasi ini dapat arahan dari Dinas PMD kab. INHIL untuk pemerintahan desa biar dapat mendata asset melalui aplikasi, kalau saya lihat operator yang mengelola aplikasi SIPADES ini memang masi perlu di bina kalo dilihat sekarang memang masi belum menguasai aplikasi tersebut jadi pelaksanaanya belum optimal”⁵⁸ 06/12/12

⁵⁷ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Sekretaris Desa Sungai Baru

⁵⁸ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Sekretaris Desa Sungai Baru

Berdasarkan wawancara dari informan dapat dijelaskan bahwa Kapasitas Sumberdaya operator aplikasi sipades dalam pelaksanaan aplikasi belum menguasai aplikasi, dikarenakan aplikasi sipades masih baru di desa dan dalam pelaksanaannya belum bisa di maksimalkan.

3. Website Desa

..... “Terkait sdm dalam pengelolaan website di Desa ini sebenarnya sudah bagus cuman saja terkendala dalam jaringan jadi susah bagi kami untuk menjalankan website tersebut, jika dilihat dari pembinaan dan pelatihan sudah dua kali di lakukan, tinggal saja peaksanaanya saja dilapangan lagi-lagi kendala jaringan jadi website tidak bisa berjalan dengan baik”⁵⁹ 06/12/12

Berdasarkan wawancara dari informan dapat dianalisa sebagai berikut, untuk kapasitas operator yang menjadi admin website sudah baik, Cuma dalam pelaksanaan terdapat kendala di jaringan.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Sekretaris Desa Bapak Peni Purmanda, SE di Kantor Desa 06/12/12 waktu 09.30 WIB s/d selesai dapat peneliti amati bahwa terkait kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes, Sipades dan website desa bisa di katakana baik, tapi perlu ada pembinaan dan pelatihan dari para *stackholder* terkait sehingga benar-benar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan *e-government* di Desa Sungai Baru.

Penjelasan Sekreatsis Desa juga diperkuat oleh Kepala Desa Sungai Baru dijelaskan bahwa:

.....“Kapasitas SDM didesa kami ni dalam menjalankan aplikasi memang sudah ada yang siap dan ada juga yang belum, seperti

⁵⁹ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Sekretaris Desa Sungai Baru

aplikasi siskeudes masi di bekap oleh sekdes untuk aplikasi lainnya masi dalam tahap pembinaan awal agar bisa memaksimalkan aplikasi tersebut”⁶⁰ 06/12/12

Dari penjelasan dua informan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Dalam hal ini kualitas sumber daya manusia (SDM) memang harus diperhatikan, karna salah satu Faktor elemen sukses penerapan *e-government* yaitu sumberdaya manusia (SDM). Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Sungai Baru dalam pelaksanaan aplikasi ini sudah baik dan siap menjalankan *e-government* tersebut hanya saja perlu pembinaan dan pelatihan dari para *stackholder* terkait sehingga benar-benar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan *e-government* di Desa Sungai Baru.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Kepala Desa Bapak Catra Hidayat, SE di Kantor Desa 06/12/12 waktu 11.30 WIB s/d selesai dapat peneliti amati bahwa terkait kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa khususnya para operator yang mengoprasikan aplikasi dan website desa ini dapat peneliti simpulkan sudah baik. Dikarenakan sudah ditempatkan operator yang siap melaksakan aplikasi. hanya saja perlu pembinaan dan pelatihan dari para *stackholder* terkait sehingga benar-benar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan *e-government* di Desa.

⁶⁰ Catra Hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Kepala Desa Sungai Baru

3. Sumber Daya Finansial (Ketersediaan Anggaran)

Ketersediaan dan konsistensi anggaran ini merupakan dukungan yang besar untuk dapat mengembangkan aplikasi *e-government* di Desa Sungai Baru yang sudah diterapkan. Oleh karena itu dukungan pemerintah menduduki peran yang sangat penting jika dukungan pemerintah tidak diberikan maka dipastikan penerapan aplikasi *e-government* di Desa Sungai Baru juga tidak akan berjalan dengan mulus.

Keterbatasan pendanaan dalam penerapan *e-Government* ini bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan proses kerja secara elektronik. tantangan utama bagi pemerintahan Desa adalah mampu menyediakan infrastruktur telekomunikasi seperti komputer, jaringan internet, pembinaan dan pelatihan SDM dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. sehingga dengan kondisi ini pemerintahan Desa harus senantiasa berstrategi dalam membangun jaringan *e-government* luas walaupun dana terbatas.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Catra Hidayat, SE menjelaskan terkait kesediaan anggaran terhadap pelaksanaan *e-governnmet* di Desa Sungai Baru sebagai berikut:

...“Mengenai dukungan anggaran terhadap aplikasi-aplikasi di desa sungai baru ini, memang kami anggarkan di APBDes sesuai yang di intruksikan Dinas PMD. Sebenarnya bagus dengan adanya inovasi ini cuman memang tidak setiap desa bisa menjalankan aplikasi apalagi aplikasi online, kami dari desa tidak ada masalah menganggarkan beberapa aplikasi apalagi itu ada manfaatnya buat desa dan masyarakat desa, masalahnya aplikasi *online* yang memang tidak mendukung di Desa Sungai Baru ini. Ya memang jaringan internet sangat tidak memadai”⁶¹ 07/12/12

⁶¹ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Sekretaris Desa Sungai Baru

Hal senada juga di sampaikan Sekretaris Desa Bapak Peni Purmanda, SE bahwa :

... “Anggaran setiap aplikasi memang sesuai arahan, di kantor kami ini ada tiga aplikasi dan satu website desa, terkait anggaran memang hanya satu saja yang berlangganan setiap tahunnya yaitu website desa, untuk website desa setiap tahun kami anggarkan perpanjangan domain,, kalau tidak di perpanjang maka website desa akan berubah menjadi blogs. Untuk aplikasi kami Cuma menganggar pelatihannya saja. Kalau aplikasinya gratis. Beda sama website desa, untuk website harus dianggarkan websitenya sama perpanjang domain website setiap tahunnya”.⁶² 07/12/12

Berdasarkan wawancara dari informan dapat peneliti analisa sebagai berikut, penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru ini dianggarkan dalam APBDes anggaran tersebut digunakan untuk domain website setiap tahunnya, pelatihan dan lainnya.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Kepala Desa dan Sekretaris Desa bapak Catra Hidayat, SE dan bapak Peni Purmanda, SE di Kantor Desa 07/11/2021 waktu 09.00 WIB s/d selesai dapat diamati bahwa dalam pelaksanaan *e-government* di desa dilihat dari segi anggaran ini sudah baik dapat dilihat dari adanya anggaran melalui APBDes untuk keperluan dalam pelaksanaan *e-government* di desa.

Ketua BPD Desa Sungai Baru Ibu Yulianti juga menjelaskan terkait anggaran pelaksanaan *e-government* di Desa sungai baru bahwa:

“Untuk anggaran dalam penerapan aplikasi memang sudah kami sepakati dan di anggarakan melalui APBDes diperuntukan untuk pasilitas infrastruktur telekomunikasi, pelatihan operator, pemeliharaan komputer dan langganan domain website Desa”⁶³ 07/12/12

⁶² Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Sekretaris Desa Sungai Baru

⁶³ Yulianti, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Selaku Ketua BPD Desa Sungai Baru

Dari penjelasan Tiga informan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa mengenai Sumber Daya Finansial atau budget untuk penerapan aplikasi e-government pada pemerintahan desa sungai baru ini sudah ada terlihat melalui APBDes yang mana anggaran ini di peruntukan untuk memfasilitasi infrastruktur telekomunikasi Desa seperti komputer, pelatihan operator serta pemeliharaan insfrastruktur tersebut. Dukungan terhadap anggaran dalam penerapan aplikasi e-government di desa sungai baru ini pada dasarnya belum optimal, dikarenakan untuk penyediaan anggaran dalam bidang penerapan maupun pengembangan e-government pemerintahan desa belum menjadi prioritas utama.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Ketua BPD Ibu Yulianti, SE di Rumah Ibu Bpd 07/11/2021 waktu 15.00 WIB s/d selesai dapat diamati bahwa sumberdaya finansial/dukungan anggaran terkait pelasaan e-government di desa ini sudah baik, dimana dapat peneliti temukan bahwa sudah ada dimasukan didalam APBDes yang mana anggaran tersebut diperuntukan peruntukan untuk memfasilitasi infrastruktur telekomunikasi Desa seperti komputer, pelatihan operator serta pemeliharaan insfrastruktur tersebut. Dukungan terhadap anggaran dalam penerapan aplikasi e-government di desa sungai baru ini pada dasarnya belum optimal, dikarenakan untuk penyediaan anggaran dalam bidang penerapan maupun pengembangan e-government pemerintahan desa belum menjadi prioritas utama.

4.3.3 Nilai/Value

Nilai/Value Elemen pertama dan kedua diatas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-*supply side*). Pelaksanaan *e-government* tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-*demand side*). Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) secara signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Perpaduan antara ketiga elemen diatas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan *e-government*) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan *e-government*. Adapun sub indikator dari nilai/*value*

1. Manfaat Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Sungai Baru

Penerapan dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mengarahkan para perangkat desa agar dapat bekerja dengan lebih maksimal serta dapat menghasilkan sebuah laporan yang dapat memberikan informasi yang tepat. Adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi setiap perangkat desa. Meskipun sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan sistem yang baru diterapkan

di Desa Sungai Baru, namun para Perangkat Desa telah merasakan manfaat dari adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Catra Hidayat, SE selaku Kepala Desa Sungai Baru mengatakan bahwa:

“Bagi saya manfaatnya luar biasa, dengan ada sistem keuangan desa ini untuk pekerjaan lebih tertata secara administratif, didalam aplikasi ini sudah termaping dan sudah teratur secara sistem”⁶⁴ 09/12/12

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan Pendapat Bapak Peni Purmanda, SE selaku Sekretaris Desa sekaligus yang mengoprasikan aplikasi sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mengatakan bahwa:

“Sebelum adanya aplikasi siskeudes ini, saya dalam pengimputan/pelaporan masi menggunakan cara manual dan ini memang sangat merepotkan bagi saya. Setelah hadirnya aplikasi siskeudes ini saya dan kawan-kawan desa lain sangat terbatu. Karna di dalam aplikasi sudah teratur kita tinggal mengiput saja semuanya sudah tersistem.”⁶⁵ 09/12/12

Penjelasan dari informan tersebut menyatakan bahwa adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi para Perangkat Desa Sungai Baru. Sebelum menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini, Perangkat Desa masih menggunakan cara manual dalam pelaporan keuangan desa. Dalam hal ini para perangkat desa merasa kesulitan dalam bekerja karena belum mengetahui arah yang benar dari pekerjaan mereka. Dengan diterapkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut telah membantu kerja para Perangkat Desa, dimana

⁶⁴ Catra Hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Kepala Desa Sungai Baru

⁶⁵ Peni Purmanda, 28 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Sekretaris Desa Sungai Baru

pekerjaan yang dilakukan dapat lebih terencana dan terarah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini, para Perangkat Desa semakin termotivasi untuk bekerja dengan baik dan benar karena dalam sistem tersebut mampu mendeteksi jika terjadi suatu kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut akan mampu membantu Desa dalam menciptakan Perangkat Desa yang lebih kompeten lagi.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Bapak Kepala Desa Catra Hidayat, SE di Kantor Desa 09/12/12 waktu 11.00 WIB s/d selesai dapat diamati bahwa manfaat dari aplikasi Siskeudes untuk pemerintahan desa ini sangat di rasakan oleh Kepala Desa Sungai Baru dengan ada Sistem Keuangan Desa ini untuk pekerjaan lebih tertata secara administratif. Selanjutnya Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat observasi Dengan Sekretaris Desa Bapak Peni Purmanda, SE di Kantor Desa 09/12/12 waktu 09.00 WIB s/d selesai peneliti menemukan bahwa sekretaris desa sekaligus operator aplikasi siskeudes sangat terbantu dengan adanya aplikasi tersebut, untuk pelaporan tidak dikerjakan secara manual lagi. Sistem aplikasi siskeudes ini pengerjaanya sudah secara sistematis.

2. Manfaat Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Asset Desa (Sipades) Desa Sungai Baru

Sistem informasi berupa Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yaitu aplikasi yang melakukan pencatatan administrasi aset tetap desa mulai

dari merencanakan, mengadakan, penata usahaan hingga penyampaian laporan lengkap dengan kodefikasi dan labelisasi aset tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya yaitu untuk menertibkan kepemilikan aset dalam upaya meminimalkan resiko kehilangan aset desa dan memberikan kemudahan kepala desa dalam menyajikan laporan aset tetap yang dimiliki kantor desa, serta sebagai sistem informasi yang membantu Perangkat Desa dalam melakukan tata kelola aset tetap.

Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) merupakan sistem yang baru di Desa. jika dilihat hadirnya aplikasi tersebut sebenarnya banyak membawa manfaat untuk desa, dimarnakan untuk medata asset sudah menggunakan sistem yang termaping sehingga memudahkan penggunaanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Joko Irawan, S.Pd selaku Staf Umum yang mengoprasikan aplikasi tersebut mengatakakan bahwa:

“Untuk aplikasi SIPADES ini baru hadir di desa, bagi saya yang baru menggunakan memang agak rumit karna memang belum banyak mengetahui tentang aplikasi tersebut, tapi menurut saya memang saya belum menguasai sistem ini setidaknya aplikasi ini banyak manfaat unuk mencatat asset di karnakan pormatnya lengkap sehingga sewaktu-waktu bisa kita akses apabila kita membutuhkan”.⁶⁶ 09/12/12

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan Pendapat Ibu Fatimah Wati selaku Kaur Umum mengatakan bahwa:

“Kami dalam pengelolaan aset desa memang masih menggunakan yang manual, unuk mengentri ke aplikasi kami melakukan secara pelan-pelan dulu. Ya !! karna pada dasarnya

⁶⁶ Joko Irawan, 30 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Staf Umum (operator aplikasi Sipades)

aplikasi ini baru jadi kami belum bisa memanfaatkan secara maksimal”⁶⁷ 09/12/12

Penjelasan dari dua informan tersebut menyatakan bahwa Pengelolaan aset Desa di Desa Sungai Baru menggunakan dua sistem yaitu pertama sistem manual dengan melakukan pencatatan ke dalam buku yang dilakukan setiap tahun dalam upaya melakukan *back-up* data aset tetap yang dimiliki Desa. Pencatatan secara manual dilakukan oleh petugas pada unit Tata Usaha dan Umum yang terdiri dari satu orang petugas dan Kepala Urusan yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan aset. Bentuk pencatatan kedua berupa sistem digital yaitu melalui aplikasi SIPADES. Penggunaan aplikasi SIPADES dirasakan belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu kurangnya pemahaman perangkat Desa dalam mengoperasikan sistem SIPADES.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Operator Aplikasi Sipades Bapak Joko Irawan, S.Pd di Kantor Desa 09/12/12 waktu 10.00 WIB s/d selesai dapat diamati bahwa aplikasi Sipades hadir di desa pada tahun 2021, peneliti menemukan adanya kesulitan operator dalam pengoperasian aplikasi karena operator belum menguasai aplikasi terbilang aplikasi ini masi baru di desa. Tapi aplikasi ini membawa dampak positif dimana pemerintahan desa bisa mendata aset desa sesuai dengan format yang sudah ditetapkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti amati bahwa Kaur Umum ibu Fatimah wati di Kantor Desa 09/12/12 waktu 10.30 WIB s/d

⁶⁷ Fatimah wati, 42 Tahun Tingkat Pendidikan SMA jabatan Kaur Umum

selesai peneliti menemukan bahwa pelaksanaan aplikasi sipades belum dimaksimalkan karena masih peneliti temukan pengerjaan secara manual dan untuk pengimputan ke aplikasi sipades masih dikerjakan secara pelan-pelan karena operator belum menguasai aplikasi.

3. Manfaat Penerapan *Website* Desa Sungai Baru

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terutama internet saat ini membawa kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya *website* membantu banyak pihak dari individu, organisasi, pemerintah bahkan swasta untuk bisa menghadirkan informasi terkini melalui media digital. Hal ini pun yang semakin menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa untuk mengembangkan pelayanan dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah kini semakin menyadari besarnya manfaat *website* untuk Desa, hal ini dibuktikan dengan peluncuran ekstensi domain desa.id sebagai ekstensi domain resmi untuk *website* Desa yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius untuk memfasilitasi Desa dalam mengembangkan layanan dan informasi berbasis *website*. Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Desa Sungai Baru Catra Hidayat, SE mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dengan adanya *website* desa di desa sungai baru ini berdampak baik kepada masyarakat, kita juga sudah bisa mengembangkan sistem pelayanan informasi di desa memang tinggal menjalankan saja lagi, tantang terbesar kami memang jaringan

internet tidak ada dan ini menjadi kendala dilapangan dan juga mempersulit masyarakat untuk mengakses”⁶⁸ 10/12/12

Penjelasan tersebut juga di perkuat dengan pendapat Bapak Camat Gaung Yuliargo, SP, M.AP menjelaskan bahwa:

Dengan adanya website ini mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa, karena pemerintah bisa memberikan informasi terkait pelayanan melalui website desa. Selain itu pemerintah desa juga bisa membuka layanan berbasis online yang tentunya mempermudah bagi masyarakat ya!!.⁶⁹ 10/12/12

Disamping itu tidak terlepas pula dari pendapat Saudara Junaidi sebagai mahasiswa asal desa sungai baru dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya juga tahu, tapi tidak ada sosialisasi selama ini saya tau dari kawan di kantor desa. bahwasanya pemerintah desa sungai baru memiliki website desa, tapi menurut saya untuk data atau layanan informasi di website tersebut bang banyak belum berubah setahu saya, karna saya pernah mengakses.. contohnya saja profil desa masi belum berubah nama desanya, ini harus cepat diperbaiki menerut saya,, jadi biar teratur”⁷⁰ 10/12/12

Ibu lisna juga berpendapat terkait website yang ada di desa sungai baru di jelaskan bahwa:

“Saye tidak tahu ape itu website desa yang kate eki tadi,, ye memang kalo saye berurusan langsung datang kekantor aje,, dan saye juge tak punye hp sudah tu taka da orang desa sosialisasi setidaknya anak kami yang tahu”⁷¹ 10/12/12

Penjelasan dari empat informan tersebut dapat di analisa bahwa penerapan *website* Desa di Desa Sungai Baru memang belum bisa di

⁶⁸ Catra Hidayat, 34 Tahun Tingkat Pendidikan S1 Jabatan Kepala Desa Sungai Baru

⁶⁹ Yuliargo, 47 Tahun Tingkat Pendidikan S2 Jabatan Camat Gaung

⁷⁰ Junaidi, 24 Tahun Tingkat Pendidikan SMA Mahasiswa

⁷¹ Lisna, 49 tahun Tingkat Pendidikan SMP Masyarakat

maksimalkan, dan *website* Desa masih dalam tahap persiapan. dapat diharapkan dengan adanya *website* Desa bisa merubah setidaknya sistem layanan informasi dan memperkenalkan potensi desa. Untuk mewujudkan itu semua pemerintah Desa harus benar-benar komitmen dalam penerapannya. Bukan hanya bagaimana pemerintahan desa dapat berinovasi tetapi bagaimana pemerintahan desa bisa memaksimalkan inovasi tersebut.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Kepala Desa Bapak Catra Hidayat, SE Dikediamannya 10/12/12 waktu 19.00 WIB s/d selesai penerapan *website* desa seharusnya berdampak baik bagi masyarakat di desa. misalnya bagi mahasiswa yang kuliah di luar kota sewaktu-waktu ingin data desa bisa diakses melalui *website*. Kendala dilapangan yaitu jaringan sehingga operator sulit dalam memperbaharui data.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat Observasi peneliti mengamati Camat Gaung Bapak Yuliargo, SP., M.AP dirumah Dinas 10/12/12 waktu 16.00 WIB s/d selesai terkait manfaat *website* desa ini pemerintah desa harus bisa memanfaatkanya karna di *website* desa pemerintah desa bisa melayani sistem informasi desa potensi desa dan lain-lain. Selain itu pemerintah desa juga bisa membuka layanan berbasis online yang tentunya mempermudah bagi masyarakat.

Disamping itu peneliti melakukan observasi bersama saudara Junaidi sebagai mahasiswa dikediamannya 10/12/12 waktu 11.00 WIB s/d selesai peneliti menemukan bahwa manfaat *website* belum dirasakan sepenuhnya,

website desa sulit diakses karna jaringan dan isi menu website banyak belum berubah, sosialisasi juga belum di laksanakan oleh pemerintahan Desa.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti amati bahwa ibu lisna sebagai masyarakat dikediamannya 10/12/12 waktu 15.00 WIB s/d selesai dapat peneliti temukan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya website desa, dan juga peneli temukan di masyarakat tidak adanya sosialisasai kepada masyarakat.

4.4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan *e-Government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Secara umum Penerapan *e-Government* di Desa Sungai Baru sudah berjalan dengan baik, meskipun tidak dapat dipungkiri permasalahan dalam aplikasi di Desa ditemukan. Prihal permasalahan yang ada berkaitan dengan seluruh aplikasi di Desa dari aplikasi Siskeudes, Sipades dan *Website* Desa terdapat hambatan dalam penerapannya. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Penerapan *e-Government* tidak lepas dari temuan Peneliti di lapangan melalui wawancara dengan informan yang mengoprasikan aplikasi, Sekretaris Desa dan Kepala Desa dan informan lainnya, mengenai Faktor-faktor penghambat dalam Penerapan *e-Government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

4.4.1. Dukungan/Support

1. Keinginan seorang pemimpin dalam menerapkan *e-government*

Desa

Kepemimpinan yang kuat dapat mempercepat proses penerapan *e-Government*, mendorong koordinasi di dalam dan di antara lembaga, dan membantu memperkuat tujuan tata kelola yang baik. Fakta bahwa *e-Government* memiliki banyak dimensi merupakan masalah yang kompleks. Setiap dimensi menuntut kepemimpinan yang kuat, strategi, dan pengetahuan, semua dikombinasikan dengan strategi teknologi untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. Dengan tujuan untuk memfasilitasi keterlibatan yang lebih mudah, lebih hemat waktu, dan lebih interaktif dengan departemen pemerintah, dan untuk membuat bisnis lebih efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi, para pemimpin *e-Government* memulai berbagai inisiatif *e-Government*.

Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru tidak terlepas dari kemauan dari pemimpin Kepala Desa Sungai Baru dalam memberikan fasilitas untuk memudahkan dan mempercepat sistem kerja Perangkat Desa dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat, ditandai dengan adanya aplikasi Siskeudes, Aplikasi Sipades dan Website Desa. Unsur Kepemimpinan Kepala Desa Sungai Baru sudah baik dalam penerapan *e-Government* dilihat dari keikutsertaan dalam mewujudkan terobosan inovasi bersama perangkat daerah untuk mengembangkan *E-Government* di Desa.

2. Payung Hukum yang mengatur dengan jelas tentang penerapan *e-Government*

Ketersedian dasar hukum dalam penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru ini sangat diperlukan untuk mengembangkan aplikasi antar pemerintah dan kepada masyarakat secara kondusif, dan aplikasi ini perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.

Yang mendasari penerapan aplikasi *e-Government* Pemerintahan Desa Sungai Baru yaitu melalui Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* dan dilanjut dengan permendagri yang mengatur sistem informasi pengelolaan masing-masing aplikasi yang ada di Desa Sungai Baru. Untuk peraturan Daerah secara teknis yang mendasari dalam penerapan aplikasi *e-government* melalui aplikasi pada Desa Sungai Baru ini belum ada. Dasar penerapan aplikasi ini masih dalam naungan peraturan pusat. Mestinya ada aturan/payung hukum yang menjadi rambu-rambu dari pelaksanaan *e-Government* di Desa.

3. Pemerintahan Desa Mampu memberikan berbagai bentuk inovasi *e-Government*

Penerapan *e-government* di Desa merupakan suatu program berbentuk perangkat lunak (*Software*) yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna dan bermanfaat untuk membantu

berbagai kegiatan dalam proses kerja dan sistem ini bertugas untuk mengelolah berbagai macam data sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunanya. Pemerintahan Desa Sungai Baru memberikan berbagai bentuk inovasi E-Government di desa ini sudah baik, ditandai dengan adanya inovasi *e-government* di Desa yaitu Aplikasi Siskeudes, Aplikasi Sipades dan Website Desa. Dengan adanya inovasi tersebut dapat memudahkan dan mempercepat kinerja perangkat Desa.

4.4.2 Kemampuan/*Capacity*

1. Infrastruktur Telekomunikasi

Esensi dasar yang telah dibentuk oleh pemerintah mengenai *e-government* adalah memfasilitasi infrastruktur telekomunikasi berupa komputer dan jaringan internet untuk menunjang kinerja pegawai dalam penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat dianalisa sebagai berikut terkait Untuk Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia di Desa Sungai Baru belum bisa diharapkan dikarenakan. *Pertama*, dalam penerapan Website Desa belum ada komputer/laptop yang khusus untuk pengoperasiannya. *Kedua*, jaringan internet merupakan masalah terbesar di Perintahan Desa Sungai Baru, apalagi di Desa sudah ada aplikasi berbasis Online (Website), sehingga dengan tidak adanya

jaringan internet ini pemerintah desa tidak bisa memaksimalkan pemanfaatan *e-government*.

2. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia yang mengerti tentang teknologi informasi khususnya perangkat desa merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci dalam keberhasilan dalam penerapan aplikasi *e-government* di Desa Sungai Baru. Mengenai kapasitas Sumber Daya Manusia Desa Sungai Baru ini sudah baik, dimana pemerintah desa sudah mempersiapkan perangkatnya untuk mengoprasikan aplikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada kendala kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengoprasian aplikasi diantaranya, **Pertama** aplikasi siskeudes yang mana Kaur Keuangan belum bisa mengoprasikan aplikasi dan saat ini masi di *backup* sama Sekretaris Desa. **Kedua** Aplikasi Sipades operator belum menguasai pengoprasian aplikasi dikarnakan aplikasi ini masi baru. **Ketiga** Website Desa operator website masih belum menguasai untuk mengubah/mengisi data-data di dalam website desa. Perlu ditingkatkan lagi kapasitas pegawai dalam pengoprasian aplikasi peningkatan kapasitas bisa dilakukanan dengan pelatihan. Semakin sering mengikuti pelatihan maka kualitas dan keterampilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab semakin baik. sehinggalan

dengan adanya peningkatan kapasitas SDM di Desa maka bisa tercapainya pemanfaatan *e-government* yang lebih maksimal.

3. Sumber daya finansial (Ketersediaan Anggaran)

Ketersediaan dan konsistensi anggaran ini merupakan dukungan yang besar untuk dapat mengembangkan aplikasi *e-government* di Desa Sungai Baru yang sudah diterapkan. Oleh karena itu dukungan pemerintah menduduki peran yang sangat penting jika dukungan pemerintah tidak diberikan maka dipastikan penerapan aplikasi *e-government* di Desa Sungai Baru juga tidak akan berjalan dengan mulus.

Mengenai Sumber Daya Finansial atau *budget* untuk penerapan aplikasi *e-government* pada Pemerintahan Desa Sungai Baru ini sudah ada dianggarkan melalui APBDes yang mana anggaran ini di peruntukan untuk memfasilitasi infrastruktur telekomunikasi Desa seperti komputer, pelatihan operator serta pemeliharaan infrastruktur tersebut. Dukungan terhadap anggaran dalam penerapan aplikasi *e-government* di Desa Sungai Baru ini pada dasarnya belum optimal, dikarenakan untuk penyediaan anggaran dalam bidang penerapan maupun pengembangan *e-government* pemerintahan Desa belum menjadi prioritas utama.

4.4.3. Nilai/Value

1. Manfaat Penerapan aplikasi Siskeudes

Sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang memiliki berbagai kelebihan bagi para penggunannya. Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa sungai baru telah memberikan perubahan dalam kinerja dari para perangkat desa. Aplikasi siskeudes merupakan aplikasi *offline* di Desa Sungai Baru. Sistem ini membantu Desa dalam melaksanakan tugas meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Jika dilihat dari kendala dalam pengopsian sistem aplikasi, berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dalam pengopsian sistem aplikasi siskeudes untuk saat ini belum ada kendala dalam pengoprasian aplikasi.

2. Manfaat Penerapan Aplikasi Sipades

Aplikasi SIPADES merupakan aplikasi *offline* di Desa Sungai Baru Sistem aplikasi ini memiliki Fungsi yang melakukan pencatatan administrasi aset tetap Desa mulai dari merencanakan, mengadakan, penata usahaan hingga penyampaian laporan lengkap dengan kodefikasi dan labelisasi aset tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun kendala dalam pengoprasian aplikasi ini yaitu, sistem yang sering *error*, setiap kali *login* data sering tidak

terbaca dan lemahnya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan aplikasi dikarenakan kurangnya pelatihan dan pembinaan dalam melaksanakan aplikasi Sipades. Pelatihan sangat membantu operator dalam mengoperasikan aplikasi sipades dengan baik dan dapat meminimalisir kesalahan. Semakin sering mengikuti pelatihan maka kualitas dan keterampilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab semakin baik.

3. Manfaat Penerapan *Website* Desa

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya pelayanan publik berupa layanan elektronik atau *e-service*, khususnya dalam hal ini adalah website, dimana website pemerintah desa diharapkan dapat menjadi media *e-government* sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat maupun mempermudah layanan elektronik. Dalam memberikan Pelayanan Elektronik yaitu makin berkembangnya eknologi informasi sehingga semakin mudah internet diakses, makin banyak masyarakat yang aktif dengan tingkat pendidikan yan lebih baik, dan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai informasi maupun tampilan sehingga adanya perubahan dan perbaikan penampilan website secara berkala. Adapun kendala dalam pelaksanaan *website* Desa ini yaitu;

1. Jaringan internet yang tidak memadai di Desa sehingga menyulitkan untuk mengakses *Website* desa.
2. *Dashboard* pada halaman *website* desa belum di perbaharui
3. Data-data Desa banyak belum di isi dan judul dan isi data banyak yang belum sesuai
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Desa sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya *website* desa.
5. Dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang sudah berumur dengan latar belakang pendidikan rendah belum bisa menggunakan perangkat elektronik.

Dari kendala dan hambatan pemerintahan Desa dalam memaksimalkan *website* desa, hal ini dapat dilihat bahwasanya *website* desa masih dalam tahap persiapan, belum sampai pada tahap pemanfaatan. Karna banyak masyarakat yang belum meraksakan manfaat adanya *website* di Desa Sungai Baru, dan juga pemerintahan Desa Sungai Baru bukan saja hanya bisa berinovasi saja, tetapi bagaimana Pemerintahan Desa bisa memanfaatkan media *e-government* yang ada di Desa.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Penerapan *e-Government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Suksesnya Penerapan *e-Government* di Pemerintahan Desa Sungai Baru dapat dilihat melalui tiga elemen sukses dalam penerapan *e-government* beserta Faktor-faktor penghambat penerapan *e-Government* di Desa Sungai Baru:

5.5.1 Penerapan *e-Government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

a. Elemen *Support*/dukungan

Proses daya dukungan indikator pertama yaitu *support*/dukungan yang dapat dikatakan sebagai pelopor dan terbentuknya penerapan aplikasi-aplikasi *e-government* di Desa Sungai Baru. Dengan adanya kemauan Pemimpin Kelapa Desa dan bekerja sama dengan Dinas PMD yang telah berhasil dalam membentuk suatu inovasi program yaitu, Aplikasi Siskeudes, Aplikasi Sipades, dan Website Desa. Pelaksanaan *e-government* di Desa Sungai Baru dilaksanakan sesuai regulasi yang ada.

b. Elemen *capacity*/Kemampuan

Indikator kedua ini yang sangat berperan dan mempengaruhi pada penerapan *e-government* yaitu mengenai infrastruktur telekomunikasi,

Sumber Daya Manusia dan dukungan anggaran. **Pertama**, Infrastruktur Telekomunikasi di desa belum baik karna tidak terdapatnya *wifi* dan Jaringan Internet untuk melaksanakan aplikasi yang sudah Online. **Kedua**, Sumber Daya Manusia terkait SDM dalam pelaksanaan aplikasi baik yang sudah *Online* dan *Offline* di Pemerintahan Desa Sungai Baru ini sudah baik dilihat dari persiapan perangkat Desa yang mengelola aplikasi tersebut. Tapi memang harus perlu di tingkatkan lagi kapasitas operator dalam melaksanakan aplikasi tersebut melalui pelatihan. **Ketiga**, Ketersedian dan konsistensi anggaran Mengenai dukungan pemerintah untuk penerapan aplikasi *e-government* di Desa Sungai Baru ini sudah ada terlihat di anggarkanya melalui APBDes

c. **Elemen Value/Nilai**

Indikator yang terakhir adalah bentuk penilaian atas program inovasi Aplikasi Siskeudes, Aplikasi Sipades dan *website* Desa. Elemen *Value/Nilai* yakni manfaat yang di rasakan oleh pemerintahan Desa sebagai sisi penyedia-*supply side* dan masyarakat sebagai sisi permintaan-*demand side*. **Pertama**, Aplikasi Sikeudes objek layanan aplikasi ini yaitu *Government To Government* (G2G), aplikasi siskeudes ini sangat membantu dan memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa. **Kedua**, Aplikasi Sipades objek layanan aplikasi ini yaitu *Government To*

Government (G2G), aplikasi ini di peruntukan untuk memudahkan perangkat desa melakukan pencatatan administrasi aset tetap desa mulai dari merencanakan, mengadakan, penata usahaan hingga penyampaian laporan lengkap dengan kodefikasi dan labelisasi aset tetap secara sistematis. **Ketiga**, *Website* Desa objek layanan kanal akses ini yaitu *Government To Cityzen* (G2C) manfaat website desa sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat maupun mempermudah layanan elektronik, layanan ini juga untuk mempermudah sistem informasi kepada masyarakat.

5.5.2 Faktor-faktor Penghambat Dalam Penerapan *e-Government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Faktor penghambat adalah hal hal yang berpengaruh sedikit/bahkan dapat menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Penerapan *e-Government* di Desa Sungai Baru tidak lepas dari temuan Peneliti di lapangan melalui wawancara dengan informan ada beberapa faktor yang menghambat Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya peraturan daerah terkait penerapan *e-government* di Desa, sedangkan sudah banyak desa-desa yang sudah berinovasi dalam penerapan *e-government*
2. Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana Infrastruktur Telekomunikasi di Desa seperti tidak adanya tower internet, kurangnya komputer/laptop

3. Kurang maksimalnya pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan aplikasi-aplikasi di Desa
4. Tidak adanya tenaga *IT*/teknisi ahli yang disiapkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dilingkup Kecamatan
5. Penyediaan anggaran dalam bidang penerapan maupun pengembangan *e-government* Pemerintahan Desa belum menjadi prioritas utama
6. Pelaksanaan sistem aplikasi Sipades terkadang sering *error*, *database* juga sering tidak terbaca disaat *login* dikarenakan aplikasi ini masih baru dan operator juga belum menguasai aplikasi
7. Pelaksanaan *website* Desa terdapat Data-data Desa banyak belum di isi, judul dan isi data banyak yang belum sesuai
8. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Desa sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya *website* desa
9. Dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang sudah berumur dan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah belum bisa menggunakan perangkat elektronik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa pembahasan yang telah disimpulkan diatas, maka penulis merekomendasikan saran-saran terkait Penerapan *e-government* di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintahan desa sungai baru berupaya membangun tower internet sehingga masyarakat bisa mengakses inovasi yang telah dibuat pemerintah desa, dan pemerintahan desa bisa memaksimalkan dan memanfaatkan layanan *e-governamnt* di desa.
2. Terkait website desa perlu dikembangkan fitur layanan intraksi kepada masyarakat dan layanan permohonan surat di desa dan perlu di perbaharui isi item menu di dalam website
3. Perlu disosialisikannya kepada masyarakat agar dapat diterapkan dengan maskimal *e-Government* di Desa
4. Perlu adanya pelatihan peningkatan kapasitas agar perangkat desa bisa terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola aplikasi di desa.
5. Perlu ditambah laptop khusus dalam pelaksanaan *e-government* di desa
6. Dalam penerapan *e-government* perlu monitoring dan evaluasi secara terus menerus sehingga dapat diketahui bagian manakah yang tidak berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Kadir. 2007. *Pengenalan Sistem Informasi*. Andi. Yogyakarta
- Al-Adawi, Z., Yousafzai, S., & Pallister, J. (2005, September). Conceptual model of citizen adoption of e-government. In *The second international conference on innovations in information technology* (pp. 1-10). Citeseer
- Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Danial dan Wasriah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2004. *Blueprint Sistem Aplikasi E-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Edhy Sutanta. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Hasyimsah, *Ensiklopedia Pemerintahan & Kewarganegaraan : Sistem dan Bentuk Pemerintah Di Dunia Jilid 7*. Jakarta : Lentera Abadi, 2010
- Hamidi. M.Si. 2010. *Metode penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press.
- Indrajit, dkk. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- _____. 2006 *Electronic Government, Konsep pelayanan publik Berbasis Interntet dan teknologi Informasi*, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK)PERBANAS, Jakarta
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kumorotomo,Wahyudi. dan Agus,Subando Margono. (2011). *Sistem informasi manajemen dalam organisasi-organisasi publik* : Gadjah Mada University Press
- Mcleod, Raymod.2010.*Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

- Moh. Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Mulyono. 2011. *Menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dengan E-Government*. Bandung: Agenda Obsevasi.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- S. H., Sayre, M. R., & Gibler, W. B. (2003). 2-D echocardiography prediction of adverse events in ED patients with chest pain. *The American journal of emergency medicine*, 21(2), 106-110..
- Syafiie, I. K. 2011. *Pengantar ilmu pemerintahan*. refika aditama
- _____2005. *ilmu pemerintahan*.PT bumi aksara
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Government (Pemerintahan yang baik)*; Bandung: CV. Mandar Maju
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yusri, M. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing

Jurnal

- Ronal Watrianthos, dkk. *Model E-Government Pemerintahan Desa. Program Studi Manajemen Informatika AMIK Labuhan Batu .Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.17 No. 1*
- Eviana Septiana Rachman, Beni Noviyanto, *Pemanfaatan E-Government Pada Desa Wonokarto Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Informasi Potensi Desa Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) Volume 8, No 1, Juli 2017*

- Muhammad Alif, Hardi Warsono, *Analisis Pengembangan E-Government Dalam Penyediaan Akses Informasi Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah*. Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Ndou, V. D. 2004. *E-government for Development Countries : Opportunities and Challenges*. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 18 (1).
- Park dalam I Wayan Ordiyasa, *Kegagalan Penerapan E-Goverment Di Negara-Negara Berkembang*, Stmik Amikom Yogyakarta, 6-8 Februari 2015. ISSN : 2302-3805
- Wijaya & Surendro, 2006. *Model E-Government Readiness Pemerintah Kabupaten/Kotamadya dan Keberhasilan E-Government*, Vol 7 No 3 Tahun 2006.
- Heek Dalam Subhan, Arif Budy Pratama, *Kesiapan Desa Dalam Penerapan E-Government (Studi Perbandingan Di Desa Semaya Dan Desa pengiringan Kabupaten Pematang)* Volume 7 Nomor 2 2019, Halaman 161-175.
- Dien Novita, *Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E Government: (Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan)*, Eksplora Informatika Vol. 4, No. 1, September 2014
- Kodarisman, R., & Nugroho, E. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, 2(2), 24-32.
- Iqbal, M., Sutarman, S., & Irmansyah, D. 2019. *Perancangan Sistem Informasi Project Management Berbasis Web Pada PT Visionet Data Internasional*. Academic Journal of Computer Science Research, 1(1).
- Budiman, S., Karim, Z. A., Efriyansyah, E., & Matridi, R. A. (2017). *Implementation Of E-Government In Kelurahan Of Tanjungpinang City*.

Peraturan Perundang-Undangan

Inpres No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Yang Mengisyaratkan Untuk Menyediakan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Untuk Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan

Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau

Permendagri No.1 Th 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa